

# KONSEP KEADILAN GENDER DALAM KEPEMIMPINAN SPIRITUAL AGAMA BUDHA

## SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Ushuluddin



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLASIFIKASI	U-2003/PA/015
U-2003 015	
PA	

Oleh:

**UMI MUFLIKHAH**  
NIM : EO.23.99.029

*Gender*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA  
2003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **UMI MUFLIKHAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 11 Juli 2003

Pembimbing,



**Dra. Aniek Nur Hayati**  
NIP. 150 273 562

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Umi Muflikhah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 18 Agustus 2003

Mengesahkan,  
Fakultas Ushuluddin,  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

**DR. A. Khozin Affandi M. A.**

NIP : 150 190 692

Ketua

**Dra. Aniek Nurhayati M. SI.**

NIP : 150 273 562

Sekretaris

**Drs. Kunawi Basyir M. Ag**

NIP : 150 254719

Penguji I

**Drs. Eko Taranggono M. Pdi**

NIP : 150 224 887

Penguji II

**Drs. Hamzah Tualeka**

NIP : 150 227 501

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penegasan Judul .....	10
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sisitematika Penelitian .....	12
<b>BAB II : KEADILAN GENDER DALAM REALITAS SEJARAH.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Gender; Teori Nature vs Teori Nurture .....	14
B. Gender dan Budaya Patriarkhi .....	22
C. Konsep Keadilan Gender: Kesatuan Harmonis Melalui Penghormatan Nature Perempuan dan Laki-Laki .....	29

BAB III :	KEPEMIMPINAN SPIRITUAL DALAM AGAMA BUDHA .....	37
	A. Masyarakat Budha .....	37
	B. <b>Kepemimpinan Spiritual Bikkhu dan Bikkhuni</b> .....	43
	C. Fenomena Bikkhuni .....	54
BAB IV :	BIKKHUNI DAN KEADILAN GENDER .....	59
	A. Bikkhuni Sebagai Pemimpin Spiritual .....	59
	B. Bikkhuni Dalam Perspektif Keadilan Gender .....	63
BAB V :	PENUTUP .....	68
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Kritik dan Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA	.....	70

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada zaman dahulu sebelum Budha dilahirkan ke bumi, pandangan terhadap perempuan sangat buruk. Wanita layaknya sampah yang tidak memiliki manfaat bagi orang lain. Mereka selalu dieksploitasi dan diperdagangkan, karena wanita bagaikan perhiasan yang berkilauan dan bila dijual akan mendapatkan untung yang besar. Perempuan dianggap manusia kotor dan hina seperti seekor binatang, yang hanya mementingkan hati dan perasaannya tanpa rasio. Oleh karena itu banyak yang berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk kedua setelah laki-laki

Hal ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant : “Saya sulit percaya bahwa wanita mempunyai kesanggupan untuk mengetahui prinsip-prinsip keilmuan, sebab wanita secara kodrat hanya untuk mengembangkan keturunan”<sup>1</sup>

Di samping itu, di beberapa negara banyak ditemukan tradisi yang menginferiorikan perempuan.

Di India wanita harus menaati lebih banyak norma-norma atau tradisi masyarakat ketimbang laki-laki. Di kawasan pedesaan India bagian Utara yang diteliti oleh Patricia Jeffry dan koleganya, mempelai perempuan dianggap sebagai “kekayaan orang lain”, dan setelah pernikahan, perempuan muda harus mengadopsi bentuk-bentuk perilaku yang menunjukkan status subordinat mereka. Mempelai belia akan

---

<sup>1</sup> M. Masyhur Amin (ed), *Wanita Dalam Percakapan Antar Agama: Aktualisasinya dalam Pembangunan*, (Yogyakarta: LKPSDM NU DIY, 1992), cet. 1, 4

jarang memulai pembicaraan dengan ayah mertuanya, ia akan memanfaatkan seorang anak sebagai perantara. Ipar perempuan tidak akan bisa pergi jauh dari rumah mereka tanpa izin. Suami mengharapkan kepatuhan istrinya dan menegakkan autoritasnya melalui kekerasan fisik. Orang tuanya sendiri enggan mencampuri, sekalipun mereka mencurigai anaknya diperlakukan dengan amat buruk. Kecuali bila seorang perempuan memiliki menantu perempuan, atau jika ia dan suaminya membangun rumah tangganya sendiri, ia bisa menikmati kekuasaan dan pengaruh atas perjalanan hidupnya.<sup>2</sup>

Seksualitas adalah kawasan lain dimana perempuan dalam masyarakat patriarkhal merasa dirinya terlalu dikendalikan. Banyak perempuan di seluruh dunia percaya bahwa benih suami mengandung semua yang diperlukan bagi bayi untuk memulai pertumbuhan, ibu hanya memberikan sari makanan agar membuatnya berkembang. Di seluruh India bagian Utara dan Tengah, proses reproduksi diarahkan melalui penggunaan metafora dua istilah yakni "benih" dan "ladang". Laki-laki memberikan benih dan essensi, dan karena benih menentukan jenis anak, maka identitas anak pada dasarnya berasal dari si ayah. (Cukup aneh kontradiksi yang inheren mengenai keyakinan bahwa laki-laki dapat menentukan sifat anak, kesalahan ditimpakan kepada perempuan yang gagal melahirkan anak laki-laki dan tidak

---

<sup>2</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC dan Pustaka Pelajar, 1996), cet. 1, 66.

dihargai). Padahal peran ibu - sebagai pemberi makan - berlanjut melalui penyusuan ketika bayi telah lahir.<sup>3</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Kedudukan wanita saat itu sangat tertekan. Seorang istri selalu hidup dalam kebimbangan. Bila ia tidak dapat melahirkan anak laki-laki, suaminya akan menikah lagi sampai suaminya mendapatkan anak laki-laki. Ada kalanya istri pertama diceraikan. Kaum gadis juga bimbang karena kalau gadis tidak menikah maka ia akan dihina oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Tidak hanya persoalan seksualitas dan tradisi masyarakat yang mensubordinatkan perempuan, tetapi hak atas kepemilikan tanah juga diberikan sepenuhnya kepada laki-laki semata, karena dianggap laki-laki adalah kepala keluarga.

Di banyak masyarakat, kekayaan diwariskan melalui garis patrilineal tetapi tidak demikian di sebagian kecil masyarakat dimana pewarisan mengikuti garis matrilineal (seperti masyarakat Asante di Ghana dan masyarakat Rembau di digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Malaysia), tetapi kontrol atas kekayaan dan tanah cenderung tetap berada di tangan laki-laki. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem matrilineal, laki-laki adalah paman dari garis ibu, saudara laki-laki dan anak laki-laki dari perempuan. Akibatnya perempuan tetap bergantung kepada suami atau anak laki-laki mereka untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 69

<sup>4</sup> Amin (ed), *Wanita*, 52



menjamin akses tanah yang diperlukan, guna menanam bahan pangan demi kelangsungan hidup mereka dan anak-anaknya.<sup>5</sup>

Itulah kondisi wanita pada saat sebelum Sang Budha lahir. Wanita merupakan makhluk yang lemah, rendah dan penuh dosa yang pekerjaannya sangat terbatas. Mereka melarang wanita-wanita masuk ke tempat ibadah dan melantunkan ayat-ayat suci, terlebih pada saat menstruasi. Wanita dianggap tidak mempunyai tempat disurga setelah kematiannya.<sup>6</sup>

Pada masa diskriminasi terhadap kaum perempuan yang demikian ekstrimnya di India dan di beberapa belahan negara lainnya. Lahirlah seorang bijak putra mahkota dari Kerajaan Kapilawastu yang bernama Sidharta Gautama yang lahir pada tahun 563 SM dan wafat pada tahun 483 SM. Ia adalah anak Raja Suddhodana yang memerintah atas suku Sakya dan ibunya bernama Maya. Selama empat puluh lima tahun mencari jalan Pencerahan dan berdakwah. Ia berfikir bahwa dengan meninggalkan kehidupan kerajaan yang serba gemerlap atau dengan melepaskan segala penderitaan akan dicapai hidup yang sempurna. Karena kehidupan yang serba mewah itu tidak menentramkan hati.<sup>7</sup>

Jalan Pencerahan yang ditempuh Sidharta Gautama disebut *Ajaran Empat Kesunyaaan Mulia* diantaranya adalah *pertama*, hidup di dunia adalah penderitaan (kelahiran, sakit, tidak dikasihani, usia tua dan kematian merupakan penderitaan). *Kedua*, penderitaan disebabkan oleh nafsu keinginan. *Ketiga*, akhir penderitaan

<sup>5</sup> Mosse, Gender, 73

<sup>6</sup> Amin (ed), *Wanita*, 51

<sup>7</sup> Harun Hadiwiyono, *Agama Hindu dan Budha*, ( Jakarta : Gunung Mulia, 2000), cet. II, 64

adalah pemadaman nafsu. *Keempat*, Jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah jalan utama berunsur delapan.<sup>8</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Oleh karena itu, penindasan merupakan penderitaan yang harus dilenyapkan.

begitu juga penindasan terhadap perempuan merupakan bentuk penderitaan yang disebabkan oleh nafsu keinginan yang ingin menguasai dan mengontrol kehidupan perempuan, dan Sang Budha mengangkat derajat perempuan dengan memberikan kebebasan secara penuh kepada wanita untuk berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan, seperti adanya upasaka, samaneri, bikhuni, theri dan mahatheri.

Beliau mengatakan: "*Bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mencapai tingkat kesucian tertinggi sebagai arahat. Dan hina atau mulianya manusia itu tergantung kepada perbuatannya, bukan pada jenis kelamin atau kastanya*".<sup>9</sup>

Dalam suatu kesempatan ketika Sang Budha sedang bercakap-cakap dengan Raja Pasenadi Kosala, seorang pesuruh datang dan memberitahu Raja bahwa telah lahir seorang bayi perempuan. Mendengar hal ini, Raja sangat sedih dan tidak senang karena beliau menginginkan seorang putra. Tetapi Sang Budha menghibur dengan mengatakan :

*"Seorang anak perempuan, Oh Baginda, dapat juga menjadi keturunan yang bahkan lebih baik daripada laki-laki. Karena ia dapat tumbuh menjadi bijaksana dan berbudi, dihormati mertuanya sebagai istri sejati. Anak yang dilahirkannya dapat melakukan perbuatan besar, dan memerintah kerajaan yang besar. Anak laki-laki yang terlahir dari perempuan seperti itu, seorang istri yang mulia, dapat menjadi penuntun bagi negerinya."* (Samyutta Nikaya I, 86)

<sup>8</sup> Djam'anuri, *Agama Kita; Perspektif Sejarah Agama-Agama*, (Yogyakarta : Kurnia Kalam Semesta, 2000), cet. 1, 69.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 51

Wanita dapat menjadi lebih baik daripada laki-laki, bila ia bersikap bijak dan memuliakan ayah-ibu seperti dewa-dewi dan wanita demikian dapat melahirkan seorang putra yang bijak pula. Ternyata Vajrin (putra raja Kosala) akhirnya menjadi ratu dari kerajaan Magadha dan menurunkan Raja Asoka yang banyak berjasa mengembangkan Agama Budha di India.

Terdapat sebuah ilustrasi yang baik tentang sikap terhadap wanita pada zaman Sang Budha terdapat dalam kata-kata Mara :

*“Tidak ada wanita dengan kebijaksanaan sempit yang dimiliki (ibarat jarak dua jari), dapat mengharap mencapai kedudukan tinggi yang hanya dapat dicapai dengan kebijaksanaan”. Bikkhuni terhadap siapa Mara menunjukkan kata-kata itu. Menjawab; “ Jika pikiran seseorang terkonsentrasi dengan benar dan kebijaksanaananya tidak pernah jatuh, kenyataan-kenyataan apakah yang menunjukkan wanita berbeda ?”<sup>10</sup>*

Oleh karena itu tidak diragukan lagi, bahwa setiap manusia laki-laki dan perempuan mempunyai derajat dan potensi yang sama bila ia terkonsentrasi pada kebenaran dalam mencapai kebijaksanaan. Tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan secara eksplisit. Kecuali baik buruknya ditentukan dari tingkah laku mereka, bukan pada perbedaan jenis kelamin atau kastanya.

Atas dasar ajaran itulah Budha mendirikan Sangha bikkhuni atas permintaan bibinya yang juga menjadi ibu asuhnya yaitu Maha Pajapati Gotami, yang diikuti oleh 500 wanita untuk memasuki Sangha. Hal ini merupakan kejutan bagi para wanita yang selama ini dihadapkan pada berbagai macam ketertindasan dan ketidakmampuan sebelum kemunculan Sang Budha, didirikannya Sangha para

---

<sup>10</sup> Amin (ed), *Wanita*, 53

Bhikhuni oleh Budha Gautama tentu saja merupakan suatu berkat tersendiri. Dalam Sangha bikkhuni tidak ada perbedaan mana yang bangsawan, yang mempunyai kekayaan atau tidak, ataupun bekas tukang sapu, semuanya mendapatkan perlakuan dan hak yang sama.<sup>11</sup>

Dengan terbukanya kehidupan suci untuk mencapai kehidupan spiritual yang tinggi bagi kaum perempuan, maka kedudukan wanita di masyarakat juga berubah. Wanita tidak lagi ditindas sebagai obyek pemuas keduniawian, tetapi ada pilihan baru dalam hidupnya untuk mencapai kesempurnaan, pengabdian tertinggi sebagai wanita terhormat.

Kehidupan kerohanian bukan hanya untuk mereka yang meninggalkan keduniawian, juga mereka yang telah berumah tanggupun dapat ditingkatkan kualitas kerohaniannya sebagai manusia dengan melaksanakan berbagai tugas kerohanian.

Maka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu diwujudkan dengan meningkatkan persamaan hak dan kewajiban bagi wanita untuk turut serta menunjang kesejahteraan kehidupan dunia maupun kehidupan setelah kematian.

Dalam Agama Budha sendiri umat Budha dibagi menjadi dua bagian : Para Sangha dan umat awam. Para Sangha terdiri dari *bikkhu* dan *bikkhuni* (rohaniawan pria dan wanita) dan umat awam laki-laki disebut *upasaka* dan perempuan disebut *upasika*. Mereka mempunyai tugas-tugas masing-masing, saling melengkapi satu sama lain atau mutualistik.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, 45

<sup>12</sup> Djam'annuri, *Agama Kita*, 71

Sangha mempunyai tugas mengajarkan jalan hidup yang benar pada umat awam dengan memberikan “Pemberian Tertinggi” atau *Dana Dhamma*. Pada acara kelahiran, perkawinan, kesakitan dan kematian umat awam mendapat pelayanan dari para bikkhu dan bikkhuni. Sementara umat awam berperan memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi untuk Sangha. Jadi hubungan timbal balik antara Sangha dan umat awam ini memastikan bahwa keduanya sama-sama memiliki peran yang penting.<sup>13</sup>

Dengan demikian Sang Budha juga memberikan kedudukan yang mulia bagi setiap wanita dalam mencapai Arahat (kesucian), tidak ada perbedaan dalam mencapai tujuan hidup yang suci, tingkah laku merupakan ukuran baik-buruk seseorang bukan pada jenis kelamin ataupun kasta.

Meskipun Budha telah memberikan dan mengajarkan ajarannya yang esensial dan sempurna, namun dirasa masih ada kendala yang mendasar dan merupakan hambatan bagi gerakan perempuan saat ini. Masih banyak pengaruh budaya patriarki, pikiran pria yang mendominasi pandangan maupun interpretasi norma, nilai maupun makna dari adat dan agama yang membatasi gerak langkah wanita. Hal ini terbukti dari peran bikkhuni yang belum dapat mengabdikan diri sepenuhnya dalam komunitas Sangha di beberapa negara yang penduduknya beragama Budha.

---

<sup>13</sup> Ven. Walpoda Piyananda, “Sangha dan Umat”, *Majalah Suara Budha*, Vol. 28, No. 2, Malaysia

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan untuk kejelasan pokok bahasan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskan permasalahan skripsi dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kepemimpinan Spiritual dalam Agama Budha ?
2. Bagaimanakah Konsep Keadilan Gender dalam Kepemimpinan Spiritual Agama Budha ?

1

2 Aplikasi

## C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu :

1. Ingin mengetahui Kepemimpinan Spiritual dalam Agama Budha.
2. Ingin mengetahui konsep keadilan gender dalam Kepemimpinan Spiritual agama Budha.
3. Sebagai pengembangan wacana gender dalam agama-agama khususnya agama Budha.

2 Aplikasi

## D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah dapat memperoleh gambaran dan penjelasan yang akurat mengenai kepemimpinan spiritual agama Budha apabila ditinjau dari perspektif keadilan gender.



## E. PENEGASAN JUDUL

Dalam skripsi ini penulis mengambil judul : “**KONSEP KEADILAN GENDER dalam KEPEMIMPINAN SPIRITUAL AGAMA BUDHA**”

- Konsep** : Berasal dari bahasa Inggris *Conceptual* yang berarti pengertian atau *Conception* berarti gambaran.<sup>14</sup>
- Keadilan Gender** : Suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan diri dan mendapat dedikasi dalam pembangunan bangsa dan negara.<sup>15</sup>
- Kepemimpinan** : Berasal dari kata dasar “pemimpin” mendapat awalan dan akhiran (ke- dan -an), yang berarti perihal pemimpin, cara memimpin.<sup>16</sup>
- Spiritual** : Berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin).<sup>17</sup>
- Agama Buddha** : Sistem, prinsip kepercayaan kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan pemujaanya serta kewajiban-kewajibannya yang bertalian dengan kepercayaan itu.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> John Ecol & Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1983), cet. XII, 135

<sup>15</sup> Eli Nur Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta : Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar, 2002), cet. 1, 19

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), cet. 4, 769

<sup>17</sup> *Ibid.* 960

<sup>18</sup> *Ibid.*, 10

**Budha**

: Berasal dari kata “bodh gaya” yaitu nama sebuah pohon yang dimanfaatkan oleh Sidharta Gautama dalam mencapai tingkat pencerahan.<sup>19</sup>

Jadi yang dimaksud judul tersebut diatas adalah suatu konsep atau pandangan yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang adil. Terutama mengaktualisasikan diri dalam sisi spiritualnya untuk mencapai Kebenaran Tertinggi dan sebagai pemimpin umat khususnya agama Budha, maupun sebagai manusia dalam mendapatkan dedikasi di segala aspek kehidupan bangsa dan negara.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau studi literer sebagai sumber primer, yaitu mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah dan lain sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan sumber data hidup, berupa wawancara dengan sumber data yang disesuaikan dengan tema penelitian. Metode ini dilakukan untuk membantu dan menunjang ketajaman isi dari sumber data literer karena sumber data literer yang membahas tema ini sangatlah terbatas.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang kami lakukan dalam sripsi ini yaitu dengan cara membaca, menelaah sumber data yang ada kaitannya dengan tema skripsi, dan

<sup>19</sup> Ibid., 65



melakukan wawancara dengan bikkhu Dharmabhijna, samanera Dhammasirri maupun bikkhuni atau Attasilani Mutia dan Attasilani Santini. Kemudian dalam menghimpun dan membahas data-data tersebut akan dilakukan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan ulang terhadap semua data yang penulis peroleh terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaannya, kejelasan, dan keselarasan data yang satu dengan lainnya.
- b. *Pengorganisasian data* yaitu mengatur dan menyusun data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. *Penemuan hasil* yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil, dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah.

### 3. Tehnik Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, baik dari sumber data literer maupun dari sumber data hidup, penulis menggunakan metode induktif dan deduktif. Yaitu menganalisis dari data yang umum kepada yang khusus dan sebaliknya. Adapun hasil wawancara dalam pemaparannya adalah dengan menggunakan metode konstruksi peneliti. Dan tehnik analisa data secara keseluruhan dari data yang diperoleh dengan menggunakan Metode Analisa Deskriptif yaitu menjelaskan pokok-pokok persoalan dan menganalisa data yang diperoleh secara teliti untuk mendapatkan kesimpulan di akhir skripsi ini.

## G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis, maka pembahasannya akan disusun penulis sebagai berikut :

- BAB I : Berisi Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Berisi tentang deskripsi konsep gender yang meliputi diskriminasi gender dan keadilan gender dengan sub-sub babnya yaitu pengertian gender : Teori nature vs Teori nurture, gender dan budaya patriarkhi, dan konsep keadilan gender : kesatuan harmonis melalui penghormatan nature perempuan dan laki-laki.
- BAB III : Berisi tentang Kepemimpinan Spiritual dalam Agama Budha dengan sub bab masyarakat atau umat budha, kepemimpinan spiritual bikkhu dan bikkhuni dan sejarah perjalanan bikkhuni.
- BAB IV : Berisi Analisis yang merupakan analisis penulis dan komentar dari penulis lainnya mengenai kepemimpinan spiritual agama Budha perspektif keadilan gender. Yang meliputi perempuan dalam Budha dan bikkhu dan bikkhuni dalam Budha perspektif keadilan gender.
- BAB V : Berisi Penutup yang meliputi Kesimpulan, Kritik dan Saran serta Daftar Pustaka.

## BAB II

### KEADILAN GENDER DALAM REALITAS SEJARAH

#### A. PENGERTIAN GENDER

Sejak sepuluh terakhir ini kata *gender* telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan-tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian pula di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender.

Ann Oakley ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula melakukan pembedaan antara istilah *gender* dan *sex*. Perbedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan seks, tapi tidak selalu identik dengannya. Semenjak dulu manusia telah mempunyai kemampuan mengidentifikasi lingkungannya menurut simbol-simbol yang diciptakan dan dibakukan dalam tradisi dan dalam sistem budayanya.<sup>1</sup>

Kata *gender* di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia belum diartikan secara benar. Kata *gender* diartikan *jenis kelamin* sama dengan *sex*. Tetapi pada Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita kata *gender* sudah lazim digunakan dengan ejaan jender. Jender secara istilah diartikan sebagai interpretasi mental dan cultural

---

<sup>1</sup> Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1997), cet. 1, 89

terhadap perbedaan jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Jender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Kata *sex* dan *gender* harus dibedakan pemaknaannya, istilah *sex* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan “jenis kelamin”. Kata *sex* selalu mengacu pada anatomi biologis seperti perbedaan komposisi kimia, hormon dalam tubuh, anatomi fisik, organ reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.<sup>3</sup>

Secara biologis perempuan berbeda dengan laki-laki, perempuan mempunyai alat kelamin vagina, rahim sehingga melahirkan, mengalami menstruasi, dan menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai alat kelamin penis, jakala atau kalamenjing dan sperma. Hal tersebut merupakan kodrat bagi laki-laki dan perempuan serta tidak dapat dipertukarkan dan dirubah artinya alami dari pemberian Tuhan.<sup>4</sup>

*gender* Sedangkan gender menurut Mansur Fakhri adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Ketika seseorang mengatakan bahwa laki-laki harus kuat, rasional, bertanggungjawab, agresif, pemberani dan sebagainya, sedangkan perempuan harus lemah-lembut, pasif, berperasaan dan sebagainya. Hal itu merupakan konstruksi sosial gender yang telah tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan serta mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Artinya sifat yang melekat

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta : Paramadina, 1999), cet. 1, 36

<sup>3</sup> *Ibid.*, 37

<sup>4</sup> *Ibid.*, 38

pada laki-laki dan perempuan tersebut dapat saja dipertukarkan atau dibalik, karena gender dapat berubah dari tempat satu ke tempat yang lain dan dari waktu ke waktu yang lain.

Misalnya pada masyarakat Mbuti di kalangan orang kerdil, berburu bisa melibatkan laki-laki dan perempuan, laki-laki menangkap udang dan mencari kacang bila mereka menemukannya, dan laki-laki maupun perempuan terlibat aktif dalam pengasuhan anak. Ada juga perempuan yang membajak tanah dan laki-laki yang memasak. Menunjukkan bahwa peran gender bukanlah kodrat yang harus dimiliki oleh masing-masing individu laki-laki dan perempuan, tetapi gender lebih merupakan bentukan dari budaya dan berbagai faktor yang melingkupinya.<sup>6</sup>

Hal tersebut senada dengan Ivan Illich yang mengatakan bahwa gender adalah identitas gramatikal yang berfungsi mengklasifikasikan suatu benda pada kelompok-kelompoknya. Identitas ini seringkali dirumuskan dengan “feminin” dan ‘maskulin’. Kelompok bahasa ini banyak ditemui dalam kelompok bahasa Eropa dan sebagian Asia.

Secara terminologi kata *gender* digunakan untuk menandai segala sesuatu yang ada di dunia dalam masyarakat vernaculer, termasuk didalamnya adalah bahasa, tingkah laku, pikiran, makanan, ruang, waktu, harta milik, tabu, alat-alat produksi dan sebagainya. Sedangkan secara konseptual gender berguna untuk mengadakan kajian

<sup>5</sup> Mansur Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. 6,

<sup>6</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), cet. 1, 5

terhadap pola hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai masyarakat yang berbeda.<sup>7</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Dengan demikian ada perbedaan yang mendasar antara kata *sex* dan *gender*.

Gender selalu dimaknai dengan seperangkat harapan, kebiasaan, adat dan tradisi yang harus diterima si bayi sejak lahir sampai dengan dewasa sebagai manuskrip hidupnya. Gender dapat berubah dari waktu ke waktu lain dan dari tempat ke tempat lain. Dan *sex* mengarah pada karakteristik tubuh seperti jenis kelamin, alat reproduksi, dan hormon-hormon yang ada dalam tubuh laki-laki maupun perempuan.

#### a. Teori Nature

Berbicara tentang gender memerlukan landasan teoritis tentang konsep keadilan gender itu sendiri. Dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan yang esensial secara biologis (*nature*), tetapi secara (*nurture*) laki-laki dan perempuan mempunyai lingkungan yang membentuk diri mereka masing-masing. Namun sampai saat ini perdebatan tentang konsep gender, apakah dikarenakan proses alam atau proses sosialisasi yang masih terus berlangsung. Pada dasarnya ada dua argumen yang bertentangan tentang pembentukan sifat maskulin dan feminin pada perempuan dan laki-laki.

*Pertama*, perbedaan sifat maskulin dan feminin ada hubungannya dengan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan adalah alami, begitu pula sifat maskulin dan feminin yang dibentuknya

---

<sup>7</sup> Ivan Illich, *Matinya Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. 1, 3

juga alami. Oleh karena itu, sifat stereotip gender sulit dirubah dan argumen ini sering disebut mazhab essensial biologis (*biological essentialism*).<sup>8</sup>

*Kedua*, bahwa pembentukan sifat feminin dan maskulin bukan disebabkan atas

perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan adanya sosialisasi dan kulturisasi. Mereka tidak mengakui adanya sifat alami maskulin dan sifat alami feminin (nature), tetapi yang ada adalah sifat feminin dan maskulin yang dibentuk dan dikonstruksi oleh sosial budaya melalui proses sosialisasi (nurture). Pemikiran ini disebut mazhab orientasi kultur (*culturally oriented contestans*).<sup>9</sup>

Landasan teori argumen pertama berawal dari teori Charles Darwin dalam bukunya "*The Descent Of Man*" yang menuliskan "bahwa pria berbeda dengan wanita dalam hal ukuran, kekuatan tubuh, ...dan seterusnya juga dalam hal pemikiran." Uraian Darwin tentang teori ini cukup kontroversial. Kemudian Carl Degler mengadakan kajian pustaka tentang aplikasi teori Darwin tentang perbedaan jenis kelamin. Degler menuliskan "bahwa otak wanita lebih kecil daripada otak pria." Bahkan teori Darwin ini dipercaya oleh seorang ilmuwan wanita M. A. Hardaker yang menulis di majalah *Popular Science Monthly* (1882) "bahwa wanita mempunyai kemampuan berfikir dan kreatifitas yang lebih rendah daripada pria, tetapi wanita mempunyai kemampuan intuisi dan persepsi yang lebih unggul." Begitu pula Edward Thordike (1914) yang percaya akan kemampuan alamiah pria yang lebih unggul diatas wanita, dengan berpendapat bahwa walaupun anak laki-laki dan

<sup>8</sup> Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda*, (Bandung : Mizan, 1999), cet. 1, 94

<sup>9</sup> *Ibid.*, 95

perempuan diberikan lingkungan yang sama, insting seksual akan menghasilkan perbedaan kemampuan mental aktifitas antara anak laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Herbert Spencer yang pertama kali sepakat dengan John Stuart Mill bahwa

wanita mempunyai hak untuk bersaing secara bebas dengan laki-laki. Tetapi dalam tulisan-tulisannya kemudian yang dipengaruhi Darwinisme Sosial, Spencer mengatakan bahwa wanita sebaiknya meniadakan hak bersaing dalam pekerjaan dengan laki-laki, serta merupakan kebodohan kalau mendidik wanita untuk bersaing dalam karier-karier bisnis dan politik, sebab otak mereka lebih kecil dan tubuh mereka lebih lemah. Dan bila wanita memahami semuanya, bahwa tempat mereka adalah lingkungan domestik, mereka tidak akan bertanya apapun.<sup>11</sup>

Keadaan biologis manusia dianggap mempengaruhi tingkah laku manusia. Pengaruh ini dapat disebabkan oleh keadaan fisik maupun fisiologi manusia. Mereka yang berorientasi biologis mengatakan bahwa faktor genetik yang membentuk differensiasi peran antara laki-laki dan perempuan adalah faktor *dimorphism* seksual yang terdapat pada homo sapiens. Perbedaan fisik antara pria dan wanita sangat terlihat jelas, rata-rata pria mempunyai fisik dan otot yang lebih kuat daripada wanita, wanita mempunyai struktur tulang pelvic yang lebih besar, yang memang sesuai untuk menyokong kehamilan. Semua ini dapat menghambat peran wanita untuk dapat berlari secepat pria, dan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan otot yang lebih besar. Perbedaan hormon juga mempengaruhi tingkat agresifitas, dimana pria lebih agresif

<sup>10</sup> *Ibid.*, 94

<sup>11</sup> Jane C. Ollenburger & Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1996), cet. 1,



dibandingkan wanita. Sedangkan perubahan hormon pada wanita saat siklus menstruasi, kehamilan, dan menyusui adalah sifat khusus feminin. Perbedaan fisik ini memberikan implikasi yang signifikan terhadap kehidupan publik wanita, sehingga wanita lebih sedikit daripada pria.<sup>12</sup>

### b. Teori Nurture

Dikemukakan oleh Free Hearty dalam Seminar Sastra Hiski :

“Wanita harus tinggal dirumah, memasak, merawat anak dan mengatur rumah tangga. Kodratkah ini ? Tidak, ini tradisi!”

Mereka yang berorientasi budaya atau nurture berargumen bahwa adanya differensiasi peran antara pria dan wanita bukan disebabkan adanya nature biologis, melainkan disebabkan oleh faktor budaya. Budaya akan berinteraksi dengan faktor biologis, dan menjadi terinstitusionalisasi. Institusi berfungsi sebagai wadah dimana kebiasaan dan norma yang berlaku akan diwarisi secara turun-temurun. Namun differensiasi peran yang kaku, menurut kelompok ini hanya cocok pada masyarakat tradisional yang perkembangan teknologinya masih terbelakang.<sup>13</sup>

Dengan penemuan teknologi modern, seperti alat-alat kontrasepsi dan susu botol pengganti ASI. Memudahkan wanita dapat mengatur jumlah anak yang dilahirkan, bahkan untuk tidak mempunyai anak sama sekali, dan tidak pernah menyusui lagi, sehingga waktunya tidak habis untuk mengurus anak lagi. Semua ini akan menghilangkan kendala biologis. Yang menghambat mereka di sektor publik.

<sup>12</sup> Megawangi, *Membiarkan*, 95

<sup>13</sup> Megawangi, *Membiarkan*, 102

Dengan nada yang sama, menurut Simone de Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* (1949) mengatakan : bahwa perempuan secara kultural diperlakukan sebagai makhluk sekunder (*secondary creation*) yang tugasnya mengasuh keluarga dan anaknya, serta memelihara lingkungan hidup. Ia percaya bahwa peran tersebut bukan karena sifat alamiah perempuan. Norma-norma feminin yang melekat pada wanita seperti pengasuh, pemelihara, pasif dan penerima adalah sifat yang dikulturkan oleh sistem patriarki. Menurut pemahaman ini, kulturalisasi norma feminin dilanggengkan oleh sistem ini agar perempuan dapat terus “ditindas”. Beauvoir menekankan bahwa para perempuan harus melepaskan diri dari norma-norma tersebut, agar mereka dapat menentukan eksistensi dirinya.<sup>14</sup>

Margaret Mead menekankan argumennya bahwa jenis kelamin biologis tak mungkin dapat dianggap sebagai satu-satunya penentu perbedaan sosio-kultural dalam struktur kepribadian laki-laki dan perempuan yang kita saksikan dimana-mana.

Melani Budiarta mengatakan bahwa sulitnya mengubah tatanan yang ada karena banyak sistem yang sengaja dirancang untuk mempertahankan tatanan seperti yang ada sekarang.<sup>15</sup>

Tetapi ada beberapa bukti antropologis yang dikemukakan oleh Friedl untuk mendukung pendapat ini. Sebagai contoh adanya keterlibatan wanita dalam peperangan suku di Asia Barat, dan para wanita yang memegang tampuk kepemimpinan penting di beberapa negara Asia Tenggara bahwa para wanita juga

<sup>14</sup> Sachiko Murata, *Tao of Islam*, (Bandung: Mizan, 1998), cet. VI, 7

<sup>15</sup> Megawangi, *Membiarkan*, 105

mempunyai kekuatan otot yang relatif sama dengan pria. Para wanita di Bali misalnya terlihat mampu mengerjakan jenis-jenis pekerjaan yang sulit dan berat yang umumnya dilakukan oleh pria, seperti mengangkat batu, mencakul, membuat jalan dan sebagainya. Semuanya ini dapat memberikan bukti bahwa wanita juga dapat berperan seperti pria. Maka mengubah institusi budaya adalah agenda penting bagi para feminis egalitis, agar kesetaraan atau keadilan gender dapat terwujud.<sup>16</sup>

## B. GENDER DAN BUDAYA PATRIARKHI

Dalam sistem sosial, hubungan antara dua kutub atau dua hal tidak selamanya seimbang. Karena adanya faktor-faktor yang membedakan antara keduanya. Misalnya saja perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dirasa belum ada kesejajaran. Karena laki-laki lebih mendominasi perempuan di sektor publik.

Patriarkhi adalah konsep bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industri, bisnis, perawatan kesehatan, iklan, agama – dan bahwasannya perempuan tercerabut dari akses terhadap kekuasaan itu. Ini lantas bukan berarti bahwa perempuan sama sekali tidak mempunyai hak, pengaruh dan sumber daya, tetapi agaknya keseimbangan kekuasaan menguntungkan laki-laki dan mengorbankan perempuan.<sup>17</sup>

Dalam struktur sosial, semenjak manusia dilahirkan kemudian memasuki keluarganya masing-masing dengan berbagai manuskrip – melalui pendidikan, kultur

<sup>16</sup> Megawangi, *Mebiarkan*, 103

<sup>17</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender & Pembangunan*, (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 1996), cet. 1, 63

pemuda, perkawinan dan sebagainya - yang telah terbentuk dan mendapat pengaruh dari lingkungan-lingkungan yang telah ada. Manuskrip-manuskrip itulah yang mengantarkan kita pada peran maskulin atau feminin dalam masyarakat. Alasan mengapa sangat sulit menolak peran gender, karena sebagian besar masyarakat di dunia adalah patriarkhal, dan melalui struktur kekuasaan itu posisi subordinat perempuan dijunjung tinggi dan dikekalkan oleh peran gender tradisional.<sup>18</sup>

Gambaran tentang perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan terjadi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari keluarga bangsawan, kelas menengah dan rakyat bawah. Tetapi kelas bangsawanlah yang lebih ketat perbedaannya.

Di Indonesia dan khususnya di pulau Jawa terjadi sejak zaman dahulu. Rekaman tentang kedudukan dan peranan perempuan Jawa pada zaman dahulu dapat dilihat dalam kitab-kitab Jawa Kuno dan Jawa Baru, meskipun filsafat tentang perempuan itu tidak 100% dari budaya Jawa tetapi (ada pengaruh India atau filsafat Hindu dan Budha di dalamnya). Namun karena Kitab itu dianut oleh masyarakat Jawa pada zamannya, maka hal ini dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat pada umumnya.<sup>19</sup>

Dalam Kitab Pararaton digambarkan perempuan bernama Ken Dedes sebagai perempuan berparas cantik molek sempurna ditambah dengan alat vitalnya bercahaya. Gambaran semacam itu karena Ken Dedes ditokohkan sebagai perempuan yang menurunkan raja-raja di Jawa. Ken Dedes bermula dari istri Tunggal Ametung,

<sup>18</sup> *Ibid.*, 60

<sup>19</sup> Binar (Ed.), *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan Dan Kemodernan* (Jakarta, Pustaka Cidesindo, 1998), 184

kemudian direbut oleh Ken Arok. Baik dari benih Tunggal Ametung maupun Ken Arok, Ken Dedes mampu melahirkan raja-raja. Dengan demikian, fungsi kedudukan dan peranan Ken Dedes sebagai pemuas seksual dan reproduksi.<sup>20</sup>

Seperti yang diungkapkan R. A. Kartini dalam suratnya tentang kejumudan adat Jawa :

“Peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan-peraturan, semua itu buatan manusia, dan menyiksa diriku saja. Kau tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etika di dunia keningratan Jawa itu. Tetapi sekarang mulai dengan aku, antara kami tidak ada cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana liberal itu boleh dijalankan. (kepada Stella, 23 Mei 1899).<sup>21</sup>

R. A. Kartini adalah salah satu dari beberapa perempuan Indonesia yang gigih memperjuangkan nasib kaum perempuan dan rakyat Indonesia yang tertindas oleh adat dan budayanya sendiri. Dan mempunyai cita-cita untuk mengangkat derajat wanita dengan memberikan pendidikan dan keterampilan.

Di beberapa negara di dunia subordinasi perempuan juga masih terlihat, secara historis wanita telah disingkirkan dari dan disepelkan dalam analisis hukum dan pelaksanaan hukum. Hal ini kerap kali dihubungkan dengan kenyataan, bahwa hanya sedikit wanita yang menjadi praktisi hukum, pembuat undang-undang, dan penjahat. Namun, terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa kehidupan, hak-hak, dan kedudukan wanita dalam masyarakat telah dipengaruhi dan mempengaruhi hukum.

Hal ini terlihat dari beberapa temuan pengadilan yang cukup berharga, dengan berkedok undang-undang perlindungan, wanita ditetapkan sebagai tidak pantas dalam

<sup>20</sup> *Ibid.*, 185

<sup>21</sup> *Ibid.*, 188

tugas kepolisian, hokum dan pemasyarakatan, kecuali tugas khusus yang berkaitan dengan pengasuhan. Pada tahun 1873, Myra Bradwell ingin berpraktek hukum di Amerika Serikat dan dilarang melakukannya karena ia adalah wanita. Ia mengajukan kasusnya sampai ke Mahkamah Agung AS dan kalah (Bradwell lawan Illinois, 1873) Kutipan dari Peradilan Bradly berikut menggambarkan sikap terhadap wanita yang berpraktek hukum:

Laki-laki adalah – atau seharusnya menjadi – pelindung dan pembela wanita. Sifat malu-malu dan kehalusan yang alamiah dan selayaknya dimiliki oleh jenis kelamin wanita, jelas tidak cocok bagi banyak pekerjaan dalam kehidupan sipil. Konstitusi organisasi keluarga, yang dibentuk menurut peraturan yang bersifat ketuhanan, dan berwujud peralatan, menunjukkan lingkungan rumah tangga yang pantas menjadi wewenang dan fungsi-fungsi kewanitaan. Harmoni...kepentingan-kepentingan dan pemandangan-pemandangan yang dimiliki...institusi keluarga adalah menjijikkan bagi gagasan mengenai seorang wanita yang mengambil suatu karier yang berbeda dan bebas dari suaminya....Benarlah bahwa banyak wanita tak menikah....tetapi hal itu merupakan kekecualian-kekecualain atas aturan umum. Takdir dan misi terpenting wanita adalah mengisi jabatan-jabatan mulia dan tak berbahaya sebagai istri dan ibu. Hal ini merupakan hukum dari Sang Pencipta.<sup>22</sup>

Pada abad ke-20, dimana teknologi informasi baik media elektronik maupun media cetak semakin berkembang, segala sesuatu menjadi suguhan yang menarik untuk dipertontonkan, terutama wanita sebagai obyek yang memberikan daya pikat tersendiri tidak kalah pentingnya. Menurut Susan Brownmiller penulis buku “Against Our Will” mengatakan bahwa “Teori lelaki berperilaku agresif pada perempuan seakan sesuatu yang lumrah.” Hal ini dapat dilihat pada sistem sosial, film, sinetron, iklan, dan novel. Buku anak-anak yang mengisahkan anak gadis yang disandera dan

<sup>22</sup> Jane C. Ollenburger & Helen A. Moore, *Sosiologi Wanita*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), cet. 1, 200

diselamatkan pengeran yang kemudian menjadikannya permaisuri. Kisah-kisah film ataupun sinetron, perempuan dilukiskan sebagai makhluk lemah, bergelimang air mata, tidak berdaya, perlu dibantu. Tatkala ia terpojok maka muncul lelaki yang hebat, agresif dan menyelamatkannya. Atau pun perempuan tua galak yang cerewet dan masih banyak kisah lain yang senada lantas berubah tatkala ada lelaki yang menggagahinya.<sup>23</sup>

Secara faktual, kebijakan pendidikan dasar juga ikut mensosialisasikan bias gender. Anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan secara berbeda, anak laki-laki biasanya diberikan pelajaran ketrampilan membuat kerajinan dari kayu dan menanam sedangkan wanita diajari memasak dan menjahit. Selain itu cerita-cerita kepahlawanan digambarkan seorang laki-laki yang gagah dapat mengalahkan musuh-musuhnya, sedangkan wanita ditempatkan sebagai pihak kedua yang berperan pembantu saja. Juga bahan-bahan bacaan yang menempatkan anak laki-laki pada sektor publik seperti membantu ayah di sawah, bermain sepak bola, mencuci mobil dan sebagainya dan anak perempuan pada sektor domestik membantu ibu di dapur, menjaga adik-adik dan membersihkan rumah. Belum lagi tindakan guru dan pengaturan kegiatan sekolah yang nyata-nyata bias gender dan tidak terkoreksi oleh pejabat-pejabat yang berkaitan dengan Pendidikan Nasional di berbagai tingkatan, hal

---

<sup>23</sup> La Rose, "Pornografi, Eksploitasi & Kekerasan Terhadap Perempuan di Media Massa", *Jurnal Perspektif*, edisi III, 2001, 14

ini merupakan tindakan melanggengkan berlangsungnya sosialisasi pendidikan yang bias gender.<sup>24</sup>

Dalam industri manufaktur, perempuan juga menjadi sasaran empuk bagi tersedianya tenaga kerja perempuan yang murah. Buruh perempuan lebih disukai karena mereka tidak berpengalaman, tidak mungkin berserikat, dianggap patuh, tergantung dan mudah diatur. Preferensi bagi pekerja perempuan menjadi bagian penting dari pembagian kerja International. Studi yang dilakukan terhadap sekelompok pekerja di pabrik elektronik Meksiko menemukan bahwa para pemilik pabrik mencari perempuan yang berusia di bawah 20 tahun dan belum menikah.<sup>25</sup>

Agama sebagai institusi keyakinan umat manusia juga merupakan batu fondasi perbedaan gender. Menurut sebagian besar tradisi agama di dunia, perempuan diberi peran sekunder. Walaupun ada bukti dalam sepanjang sejarah agama-agama, dimana perempuan juga memainkan peran kepemimpinan dalam komunitasnya, tetapi tradisi agama-agama menentang gagasan tersebut. Perdebatan tentang pendeta perempuan menghasilkan berbagai macam alasan mengapa perempuan seharusnya tidak ditasbihkan. Banyak alasan yang menunjuk kepada perbedaan biologis dasar perempuan dan peran melahirkannya, maupun kepada sejarah dan tradisi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sinung D. Kristanto "Mengatasi Kekekrasan Terhadap Anak Perempuan Melalui Perolehan Pendidikan Forma"

<sup>25</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender*, 88

<sup>26</sup> *Ibid.*, 84-85



Gambaran wanita yang hanya merupakan pelengkap bagi laki-laki dan pemuas nafsu seksual saja sangat merugikan kaum perempuan. Meskipun wanita telah bekerja keras dan berjasa tetapi merupakan bagian kecil yang tidak pernah ternilai.

Lama-kelamaan pembagian tugas domestik dan publik bagi perempuan dan laki-laki ini menimbulkan pemahaman yang merugikan, utamanya bagi perempuan. Tugas domestik perempuan pada akhirnya menempatkan posisi perempuan pada posisi subordinat, karena status mereka kurang mendapatkan penghargaan secara layak. Pekerjaan-pekerjaan domestik seperti : mengurus rumah tangga, merawat anak, memasak, berbelanja dan sebagainya, lama-lama dianggap pekerjaan yang lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki yang bekerja diluar rumah dan menghasilkan uang. Pekerjaan laki-laki dipandang lebih bernilai, dan karenanya posisi laki-laki dianggap superior atau lebih unggul.<sup>27</sup>

Pada akhirnya aturan pembagian kerja, mengakibatkan stereotiping (pelabelan) bagi perempuan inferior dan bagi laki-laki superior. Hal ini menjadi keyakinan bahwa perempuan dengan alat reproduksi yang dimiliki, lebih pantas mengurus pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki yang pada umumnya yang tidak mempunyai sifat penyabar lebih pantas menjadi pemimpin. Keyakinan seperti diatas akhirnya menjadi bagian tradisi yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Elly Nur Hayati, *Panduan untuk Pendampingan Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. 1, 21

<sup>28</sup> *Ibid.*, 22

### C. KONSEP KEADILAN GENDER: Kesatuan Harmonis Melalui

#### Penghormatan Nature Perempuan Dan Laki-Laki

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Pandangan yang memojokkan kaum perempuan dengan budaya patriarkhinya

sangat merugikan kaum perempuan pada umumnya, sehingga akumulasi perempuan baik kualitas maupun kuantitasnya di sektor publik sangat rendah.

Deklarasi PBB tentang hak-hak asasi manusia bahwa manusia berhak atas segala sesuatu tanpa membedakan jenis kelamin, ras, bahasa dan agama. Yang diperkuat dengan Konvensi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita tanggal 18 Desember 1979 menyatakan keyakinan atas hak asasi manusia, atau martabat dan nilai pribadi manusia serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup>

Di Indonesia peranan wanita dalam publik telah dirumuskan dalam GBHN 1993 (TAP/IL/MPR/1993) tentang Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa menggariskan antara lain :

”Wanita...hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala bidang, Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria ditujukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan pembangunan.....”

“Kemampuan wanita perlu lebih ditingkatkan agar dapat lebih memanfaatkan kesempatan berperan aktif di segala bidang kehidupan bangsa dan negara dalam segenap kegiatan pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan....”<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Mansur Fakhri, *Gender Dan Perubahan Organisasi*, (Amsterdam, Pustaka pelajar, 1999), cet. 1, 27

<sup>30</sup> Binar (Ed.), *Wacana*. 72

Dari kutipan diatas menunjukkan bahwa negara telah memberikan kesempatan dan keleluasaan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang kehidupan.

Dengan demikian sejak feminis Barat menggulirkan wacana feminisnya, banyak negara-negara yang tergugah untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dengan menetapkan atau memperbaiki kebijakan-kebijakan yang bias gender dan melakukan sosialisasi yang terus-menerus.

Seperti yang dilakukan kaum feminis Barat pada periode 1960 dan 1970-an dalam usahanya menyamakan kedudukan dan peran perempuan menginginkan kebebasan dan persamaan hak yang adil dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Perempuan yang identik dengan perawatan, pengasuhan, dan pekerjaan-pekerjaan domestik harus meninggalkan semuanya untuk dapat sejajar dengan laki-laki di ruang publik.<sup>31</sup>

Kini di era Pembangunan semakin banyak perempuan yang telah masuk ke dunia maskulin dan berkiprah bersama-sama dengan pria, tingkat buta huruf berkurang, tingkat pendapatan dan kemandirian perempuan semakin meningkat. Bahkan mereka tidak kawin atau anti laki-laki dan tanpa kehidupan berkeluarga menjadi hal yang mutlak.

Karena dengan jalan itulah perempuan dapat melepaskan pekerjaan yang selama ini dianggap kodrat yang dapat menghambat kemajuan perempuan. Tetapi banyak perempuan yang telah menjadi *male clone* (tiruan laki-laki) di peradaban

---

<sup>31</sup> Sachiko Murata, *Tao*, 7

modern Barat, yaitu peradaban ekonomi pasar berdasarkan untung rugi, kompetisi, kekuasaan, materi dan eksploitasi. Semuanya itu harus diperebutkan karena kesuksesan di dunia maskulin diukur oleh semua ini.<sup>32</sup>

Peradaban manusia modern baik perempuan maupun laki-laki semakin terlihat ingin menguasai, mendominasi dan mengeksploitasi. Kerusakan alam, perkosaan dan menurunnya solidaritas sosial adalah sebagian kecil contoh yang terjadi akhir-akhir ini.

Kualitas feminin seperti cinta, kepedulian, pengasuhan dan pemeliharaan semakin hilang. Timbullah pemikiran baru untuk mengoreksi kecenderungan ini yaitu memuji keunggulan kualitas feminin serta memaksimalkan perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan: bahwa secara esensial antara perempuan dan laki-laki memang berbeda. Kalau sebelumnya kualitas feminin dianggap *inferior* sekarang bahkan dianggap *superior*.<sup>33</sup>

Dengan mengakui bahwa antara laki-laki dan perempuan memang ada perbedaan secara biologis yang tidak dapat dipaksa untuk sama secara total bahkan merubahnya, maka diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi, saling membantu dalam mewujudkan keseimbangan dan keselarasan.

### **Kesatuan Dalam Keragaman**

Menurut Tawney : "...manusia mempunyai keragaman dalam dirinya masing-masing, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan dan kesukaan. Ia

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 7

<sup>33</sup> *Ibid.*, 8

mengatakan: bahwa kesetaraan yang adil adalah konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perorangan atau disebut "*person regarding equality*".<sup>34</sup>

Kesetaraan ini bukan dengan memberikan perlakuan sama kepada setiap individu yang mempunyai aspirasi dan kebutuhan berbeda, malainkan dengan memberikan perhatian sama kepada setiap individu yang berbeda agar kebutuhannya yang spesifik dapat dipenuhi. Dan lebih disetujui apabila menggunakan kata "keadilan gender" daripada "kesetaraan gender", karena kesetaraan sering menuntut kesamaan matematis yang kadangkala mengimplikasikan pengukuran outcome, hasil atau lot.<sup>35</sup>

Sejalan dengan hal diatas, Vandana Shiva seorang tokoh ekofeminis juga mempunyai konsep yang mirip dengan Tawney yang menghormati individu. Ia berpendapat: "...bahwa differensiasi peran tradisional antara laki-laki dan perempuan harus dilihat sebagai dua peran berbeda, bukan sebagai dua peran tidak setara. Kedua-duanya berperan sama pentingnya, walaupun dalam bentuk dan aktifitas yang berbeda. Differensiasi peran ini disebut *equality in diversity* (kesetaraan dalam keragaman) atau Bhinneka Tunggal Ika."<sup>36</sup>

Keragaman biologis yang berdampak terhadap adanya differensiasi peran wanita dan pria dapat diibaratkan dengan melihat ciri masyarakat tawon, dimana masing-masing jenis kelamin bertindak untuk saling melengkapi, hidup harmonis dan

<sup>34</sup> Megawangi, *Mebiarkan*, 196

<sup>35</sup> *Ibid.*, 198

<sup>36</sup> *Ibid.*, 199

mempunyai tujuan hidup bersama. Peran ratu tawon bukan berarti lebih baik daripada peran tawon pekerja dan tawon pejantan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Salah seorang penganut Freud yang pertama, Carl Jung berpandangan lain.

Lebih dari enam puluh tahun lampau ia sudah mengemukakan : bahwa prinsip kelakian dan kewanitaan masing-masing terpisah dan sama pentingnya. Oleh karena itu untuk memahami psikologi wanita perlu dilakukan studi berdasarkan keadaan wanita itu sendiri. Ia menemukan pula, bahwa kejiwaan setiap orang mengandung unsur-unsur dari kedua prinsip. Sifat-sifat yang termasuk dalam prinsip kewanitaan dan terungkap secara sadar pada kaum wanita, tetapi hanya secara tidak sadar pada pria disebut *anima*. Prinsip kelaki-lakian yang terungkap secara sadar pada pria, tetapi pada wanita terungkap secara tak sadar disebut *animus*. Komponen jenis kelamin lain yang tak disadari itu hampir sepenuhnya terbungkam. Pada manusia berjiwa matang hal itu diakui, cukup dipahami dan dilebur secara total ke dalam ekonomi psikologisnya.<sup>37</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal ini juga terlihat dalam kosmologi Cina yang menggambarkan seluruh alam semesta dalam ungkapan Yin dan Yang. Ungkapan Yin dan Yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip eksistensi yang bersifat aktif Yang dan yang lemah Yin, “kuat dan lemah” atau “pria dan wanita”. Pemikiran Cina sangat menekankan konsep harmoni dan keseimbangan, dan ini disimbolkan dari keduanya yang saling merangkul dalam keselarasan dan keterpaduan. Jika harmoni antara keduanya hilang, maka alam semesta akan berhenti mengalir dan segala sesuatu akan kacau. Dikatakan

---

<sup>37</sup> Ruth Tiffani Bamhouse, *Identitas Wanita*, (Yogyakarta : Kanisius, 1997), cet. 5, 57

kesatuan wajah Yin dan Yang tidak lain adalah Tao, yaitu kualitas paling primordial.

Kesatuan Tao ini memanifestasikan dirinya pada setiap ciptaan secara unik, sehingga terjadi differensiasi dengan kualitasnya masing-masing. Namun semua kualitas selalu terkait dengan yang dua yaitu Yin dan Yang serta yang satu yaitu Tao.<sup>38</sup>

Menurut Johann Jacob Bachofen mengatakan sisi matriarkat yang disimbolkan oleh kelekatan manusia dengan figure ibu, mempunyai sisi negatif dan positif. Sisi positif adalah manusia akan mempunyai rasa penuh kasih sayang dan melihat segala sesuatu sebagai bagian dari kesatuan tanpa pandang bulu. Kalau kualitas matriarkat ini terlalu berlebihan, maka yang terjadi adalah manusia akan terlalu toleran terhadap apa saja, termasuk yang melanggar norma-norma baik dan buruk, tidak disiplin, tidak memperhatikan hukum-hukum, dan hilanglah individualitas manusia. Sedangkan sisi patriarkat disimbolkan dengan figure ayah dalam kehidupan manusia yang direpresentasikan dengan sikap keagungan, kekuasaan, hukum-hukum, kewajiban dan hierarkis. Sisi positif dari aspek patriarkat ini adalah disiplin, ketaatan pada hukum, serta berkembangnya individualitas dan rasionalitas manusia. Namun sisi negatif dari aspek ini adalah otoriter, penindasan dan hubungan manusia serba instrumental.<sup>39</sup>

Kesetaraan dalam keragaman dapat tercapai bila keragaman yang ada pada diri manusia dapat dihormati sebagai sesama makhluk hidup, tidak lebih dan tidak kurang dari yang lainnya, tetapi semata-mata berbeda dalam kemampuan, bakat, dan kodratnya.

---

<sup>38</sup> Megawangi, *Membicarakan*. 229

<sup>39</sup> *Ibid.*, 231

Seorang pejuang feminis Indonesia dalam beberapa pemikiran dan suratnya dapat dijadikan pijakan dengan dituliskannya bahwa :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 “Kecerdasan pikiran penduduk Bumiputera tiada akan maju dengan pesatnya, bila perempuan ketinggalan dalam usaha itu, (yaitu) perempuan jadi pembawa peradaban.”....”saya sendiri yakin sungguh bahwa dari perempuan itu mungkin timbul pengaruh yang besar, dalam hal memperbaiki atau memburukkan kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak membantu memajukan kesusilaan manusia.” “.....Dan betapakah ibu Bumiputera itu sanggup mendidik anaknya, bila mereka itu tiada berpendidikan.<sup>40</sup>

Di sini terlihat bahwa pendekatan Kartini untuk kebebasan wanita adalah bukan dengan model konflik yang berasumsi bahwa pola relasi sosial selalu berdasarkan konflik penguasa (pria) dan subordinat (wanita). Namun lebih pada model fungsional, dimana hubungan pria dan wanita merupakan kesatuan yang saling melengkapi.

Dari sinilah mungkin kita dapat membuat sebuah paradigma alternatif tentang definisi kebebasan wanita. Kartini memberikan paradigma yang menempatkan kebebasan wanita dan ketergantungan secara simultan. Artinya : kebebasan wanita digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id untuk dapat memajukan dirinya sebagai individu, ternyata juga untuk memerankan secara optimal sisi lain identitas kodratnya yang tergantung pada lingkungannya (dalam hal ini anak dan suaminya). Definisi ini tentunya berlaku pula untuk kaum pria. Eksistensi diri pria yang sering dikaitkan dengan kebebasan (sifat dasar maskulin) adalah tidak lepas dari kebutuhan untuk melindungi dan memberikan komitmen kepada orang-orang yang ia cintai (ini merupakan sifat ingin menyatu dengan lingkungan). Berhubung paradigma ini mengakui keberadaan hak otonomi

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, 216



dan ketergantungan sekaligus, maka paradigma ini dapat kita sebut *paradigma inklusif*. Paradigma inklusif ini tentunya mengakui dan menghormati nature atau naluri kodrati masing-masing individu.<sup>45</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>45</sup> *Ibid.* , 220

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### BAB III

## KEPEMIMPINAN SPIRITUAL DALAM AGAMA BUDHA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. MASYARAKAT BUDHA

Dalam ajaran Budha, umat Budha dibagi menjadi dua kelompok yaitu kaum Sangha dan kaum perumah tangga, hal ini diterangkan dalam kitab Sigalovada Sutta. Sang Budha bersabda bahwa peran Sangha dan umat saling terkait dalam hubungannya satu dengan yang lainnya artinya saling membantu dalam mencapai tingkat kesucian.<sup>1</sup>

Pemeluk agama Budha atau masyarakat Budhis terdiri dari dua kelompok anggota yaitu *pertama*, Umat Budha tidak berumah tangga yang selanjutnya disebut Sangha, yang melaksanakan 100 aturan moral. Mereka disebut samanera (yang pria) dan samaneri (yang perempuan). Samanera dan samaneri adalah calon bikkhu (yang pria) dan calon bikkhuni (yang perempuan). Seorang bikkhu melaksanakan 227 peraturan moral dan seorang bikkhuni melaksanakan 311 peraturan moral bagi aliran Theravada dan 500 peraturan moral bagi aliran Mahayana termasuk juga etika berbicara. *Kedua*, Umat Budha berumah tangga yang selanjutnya disebut umat awam. Mereka melaksanakan lima aturan moral (pancasila), 8 aturan moral (attasila) dan 10 aturan moral (dasasila). Mereka disebut upasaka (yang pria) dan upasika (yang perempuan).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ven. Walpoda Piyananda, Peran Sangha dan Umat, "Suara Budhisme", Desember 1990, Vol. 28, No. 2, Malaysia

<sup>2</sup> Djam'annuri (Ed.), *Agama Kita : Perspektif Sejarah Agama-agama*, (Yogyakarta : kurnia Kalam Semesta, 2000), cet. 1, 71

Aturan moral bagi upasaka dan upasika itu sebagai berikut :

1. Tidak membunuh makhluk artinya tidak hanya dilarang membunuh manusia tetapi juga tidak boleh membunuh binatang dan tumbuhan. Misalnya : kita mandi memakai sabun berarti kita telah membunuh kuman-kuman.<sup>3</sup>
2. Tidak mencuri artinya tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan.
3. Tidak berzina artinya meskipun sudah bersuami istri tidak boleh melakukan hubungan seksual, kecuali umat yang mengambil tiga pusaka.<sup>4</sup>
4. Tidak berkata bohong.
5. Tidak minum minuman yang memabukkan.<sup>5</sup>
6. Tidak makan sesudah jam 12 siang artinya tidak makan nasi dan susu kecuali air dan buah-buahan yang ukurannya lebih kecil diperbolehkan.<sup>6</sup>
7. Tidak ke tempat hiburan.
8. Tidak berhias artinya tidak menggunakan parfum atau make up
9. Tidak tidur di tempat yang enak.
10. Tidak memegang atau menerima uang artinya boleh memegang dan menerima uang tetapi tidak memikirkan uang tersebut secara terus-menerus.<sup>7</sup>

Seorang umat perumah tangga bila ingin menjadi bikkhu ataupun bikkhuni harus melaksanakan aturan moral tersebut. Dimulai dari Pancasila, Attasiia dan sampai pada Dasasila. Sebenarnya secara teknis umat biasa bisa disebut upasaka

<sup>3</sup> Ven. Sakya Dharmabijna, Ketua Cetya Dhyana Vimala, Wawancara Pribadi, Surabaya, 18 Mei 2003.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Agus Hakim, *Ilmu Perbandingan Agama*, (Bandung: PT. Diponegoro, 1990), cet. iv, 170

<sup>6</sup> Attasilani Mutia, Umat Budhiis, Wawancara Pribadi, Malang, 31 Mei 2003

<sup>7</sup> *Ibid.* ,

maupun upasika apabila telah memenuhi tiga mustika atau Tricarana yaitu : Aku berlindung kepada Budha, Aku berlindung kepada Dhamma, dan Aku berlindung kepada Sangha.<sup>8</sup>

Perbedaan peraturan moral ini disebabkan para Sangha harus melaksanakan ibadah tanpa mengurus kebutuhan jasmaninya, sedangkan umat awam mengharapkan berkah dari para Sangha dengan memberikan sedekah untuk mencukupi kebutuhan Sangha. Oleh karena itu, umat awam berperan penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi untuk Sangha, seperti : memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Tugas Sangha adalah mengajarkan jalan hidup yang benar pada umat awam dengan memberikan “Pemberian Tertinggi” Dana Dhamma.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam kejadian-kejadian penting hidup manusia seperti kelahiran, perkawinan, kesakitan dan kematian, Umat awam mendapatkan pelayanan dari para bikkhu dengan pembacaan paritta (perlindungan). Jadi hubungan timbal balik antara Sangha dan umat ini memastikan bahwa keduanya sama-sama memiliki peran yang penting.<sup>10</sup>

Hal ini berarti penghidupan upasaka dan upasika dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya termasuk dalam tata tertib para Ariya (orang-orang yang mulia) dan

<sup>8</sup> Erwin Cakra, Umat Budhis, Wawancara Pribadi, Surabaya 7 Mei 2003

<sup>9</sup> Attasilani Mutia, Umat Budhis, Wawancara Pribadi, Malang, 31 Mei 2003. Dana Dhamma adalah kemurahan hati. Memberikan kebahagiaan ganda kepada si pemberi dengan menghalangi timbulnya pikiran mementingkan diri sendiri. “Ia memberkati yang memberi dan menerima” atau memberikan pengajaran sebagai Jalan Tengah yang mengarahkan manusia pada kehidupan dan pikiran murni untuk berlaku bijaksana dari semua kejahatan.

<sup>10</sup> *Ibid.*

berada dalam rangka “the way of life” seorang umat Budha. Dalam Samyutta Nikaya, salah satu kitab agama Budha yang tertua, diceritakan bahwa Sakka, raja para dewa, bukan saja memuja para bikkhu yang telah melaksanakan penghidupan bersih dan suci, tetapi juga para upasaka dan upasika yang telah melakukan pekerjaan yang terpuji, yang menuntut penghidupan bersih dan yang memelihara keluarganya dengan semestinya.<sup>11</sup>

Keberadaan dan perkembangan Budha Sasana tergantung pada hubungan dua kelompok ini. Tetapi, Sangha memegang tanggung jawab langsung atas Sasana atau sistem Budhis, sedangkan umat awam menopang kebutuhan Sangha agar Budha Sasana tetap berjalan. Pendekatan Budha Sasana memiliki tiga unsur :

1. Pariyatti yaitu pelajaran tentang ajaran Budhis.
2. Paripatti praktek Dharmma dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pativedha penembusan yang menunjukkan perwujudan dari Empat Kebenaran

Mulia seperti yang diterangkan oleh Sangha Budha. Anggota Sangha sepanjang hidupnya harus mengerahkan diri dalam praktik untuk menerapkan, mengajarkan, mengkhotbahkan dan melaksanakan ajaran Sang Budha.<sup>12</sup>

Ini menjelaskan bahwa Sangha harus mengkhususkan diri terutama dalam belajar, mengajar, berkhotbah dan melaksanakan Budha Dhamma, Sang Budha berkata: “*parattama, patipajjaha*”, “*Laksanakan tugasmu demi makhluk lain.*” Sangatlah jelas bahwa bikkhu dan bikkhuni tidak mempunyai waktu untuk terlibat

<sup>11</sup> MP. Sumedha Widyadarma, *Dhamma Sari*, Depag RI, 2001, 128

<sup>12</sup> Ven. Walpoda Piyandana, *Peran Sangha*,

dalam kegiatan atau fungsi lain. Mereka tidak mempunyai waktu untuk bekerja mencari nafkah. Maka dibutuhkan komunitas untuk mempertahankan kehidupan para anggota Sangha, yang telah memberikan waktu dan tenaganya untuk kesejahteraan makhluk lain. Komunitas untuk tujuan ini terdiri dari umat upasaka dan upasika.<sup>13</sup>

Para umat Budhis telah menjalankan tugas ini semenjak zaman Sang Budha, sehingga Budha Sasana tetap terpelihara. Hubungan antara Sangha dan umat yang telah ada sejak zaman Sang Budha ini mengalami perubahan yang relevan dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan dalam masyarakat. Akibatnya, para bikkhu dan bikkhuni di banyak negara Budhis menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi negaranya, dengan menjadi guru untuk pelajaran lain dan bertindak sebagai penasehat para Raja, sehingga kemudian menjadi guru para penguasa, raja, pangeran, menteri dan banyak orang. Di beberapa negara seperti Srilanka dan Thailand, bikkhu dianggap sebagai dewa-dewa penjaga setiap keluarga “jatiye mura devatava”.<sup>14</sup>

Nilai dan pentingnya bikkhu menjadi guru atau pengajar dalam sebuah keluarga ataupun dalam suatu bangsa tercermin tidak hanya dalam hubungannya dengan keluarga-keluarga kelas atas dan kaya, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Seorang bikkhu yang hidup lama di suatu desa dihormati oleh penduduk karena dianggap sebagai guru dan pembimbing, yang akan memajukan aspek-aspek duniawi maupun spiritual mereka.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.* ,

Di negara-negara yang beraliran Theravada, untuk setiap peristiwa penting dalam kehidupan ini orang mengunjungi vihara, dengan kesenangan akan bikkhu di hati mereka. Saat kehamilan, melahirkan, pertama kali bayi merasakan makanan, saat penting dimana pertama kali anak belajar, pesta pernikahan, saat salah satu anggota keluarga sakit, saat kematian salah satu anggota keluarga, saat jasa kebajikan dilaksanakan atas nama seseorang yang meninggal, untuk hal-hal seperti itu dan untuk kesempatan-kesempatan serupa banyak orang yang mencari petunjuk dari para bikkhu.

Pelayanan bikkhu pada saat seperti itu diharapkan oleh umat Budhis. Para bikkhu memberikan pelayanan dengan cinta kasih, welas asih, simpati dan keseimbangan batin, tanpa mengharap balasan apapun.<sup>15</sup>

Karena itu, umat Budhis tidak pernah lalai memenuhi tugas-tugas mereka terhadap para bikkhu.

Seorang anggota keluarga umat awam harus melakukan kewajibannya terhadap para pertapa dan brahmana sebagai arah atas (zenith) dalam lima cara :

Dengan tindakan penuh welas asih  
 Dengan kata-kata penuh welas asih  
 Dengan pikiran penuh welas asih  
 Dengan membuka pintu rumah bagi mereka  
 Dengan memberikan kebutuhan atau bantuan kepada mereka.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Attasilani Mutia, Umat Budhis, Wawancara Pribadi, Malang, 31 Mei 2003

<sup>16</sup> Ven. Walpoda Piyananda, *Peran Sangha dan Umat*. Nibbana diartikan sebagai padamnya keserakahan, kebencian dan kebodohan serta bukan kekosongan atau kehampaan melainkan keadaan "tidak dilahirkan, tidak menjelma dan tidak tercipta."

Karena diperlakukan sebagai arah atas, maka para pertapa dan brahmana menunjukkan cinta kasih mereka kepada para anggota keluarga umat dalam 6

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 cara : Mencegah mereka dari berbuat kejahatan  
 Menasehati mereka untuk berbuat kebajikan  
 Mencintai mereka dengan pikiran yang baik  
 Mengajarkan apa yang belum mereka ketahui  
 Membetulkan dan meningkatkan apa yang telah mereka pelajari  
 Menunjukkan mereka jalan ke nibbana

Dengan cara ini zenith dapat terlindungi dan menjadi aman serta mantap bagi keberadaan Sangha dan umat Budha.<sup>17</sup>

## B. KEPEMIMPINAN SPIRITUAL BIKKHU DAN BIKKHUNI

Dalam agama Budha terdapat dua pemimpin spiritual yaitu imam perempuan disebut bikkhuni dan imam laki-laki disebut bikkhu.<sup>18</sup>

Untuk menjadi bikkhu dan bikkhuni, tidak seperti yang dilakukan oleh umat Budha yang hanya mengucapkan Triratna tanpa disaksikan oleh bikkhu Sangha, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan dan melalui prosedur-prosedur yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 ketat. Mereka harus menjalani pentahbisan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Budha dalam Vinaya Pitaka.

Upacara pentahbisan ini untuk seorang bikkhu dan bikkhuni disebut Upasampada dan untuk seorang samanera dan samaneri disebut Pabbajja. Setelah menjalani pentahbisan, seorang bikkhu dan bikkhuni harus menjalani Patimokha Sila yang menjadi awal bagi kehidupan suci dan Abhisamacarika Sila, sedangkan

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Anagarini Santini, Ketua Sangha Bandung, Wawancara Pribadi, Bandung, 28 April 2003



samanera dan samaneri melaksanakan Dasa Sikkhapada, Nasananga, Dandakamma dan Sekhiya Sikkhapada.<sup>19</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Dalam sejarah pentahbisan untuk menjadi seorang bikkhu dan bikkhuni ada

beberapa cara upasampada sebagai berikut :

a. Ehi Bhikkhu Upasampada

Pantahbisan menjadi bikkhu dan bikkhuni dengan cara ini dilakukan oleh Sang Budha ketika masih hidup, dengan menyatakan :

“ Marilah bikkhu, Dhamma telah diajarkan dengan sempurna, jalanilah cara hidup suci untuk mengakhiri semua dukkha.”<sup>20</sup> (Vinaya Pitaka I, 12). Demikianlah cara pentahbisan yang dilakukan oleh Sang Budha sejak beliau mentahbiskan lima orang pertapa yaitu siswa pertamanya.<sup>20</sup>

b. Tisanagamana Upasampada

Setelah Sangha berkembang, Sang Budha memberikan wewenang kepada seorang bikkhu sebagai Upajjhaya (bikkhu yang mentahbiskan) untuk melakukan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Tisanagamana Upasampada. Seorang calon sebelum ditahbiskan menjadi bikkhu harus mencukur rambutnya dan menyediakan jubah dan mangkuk terlebih dahulu. Setelah itu dia harus menirukan kata-kata Upajjhaya : “Kepada Sang Budha, Dhamma, dan Sangha aku pergi berlindung.” (Vinaya I, 21).<sup>21</sup> Saat ini metode ini

<sup>19</sup> Pandita Dhammavisarada Drs. Teja S. M. Rasyid, *Sila dan Vinaya*, (Jakarta : Budhis BODHI, 1997), 121

<sup>20</sup> *Ibid.*, 122

<sup>21</sup> *Ibid.*, 122

sudah tidak dipakai lagi, tetapi digunakan untuk mentahbiskan pemuda berusia diatas tujuh tahun sampai diatas 20 tahun. Pemuda ini disebut samanera

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
c. Naticatutthakamma Upasampada

Perkembangan selanjutnya dari pentahbisan ialah setelah banyak terdapat bikkhu-bikkhu yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda pula. Sang Budha dengan tujuan untuk meletakkan suatu asas yang kokoh bagi agama Budha dan demi manfaat orang banyak memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Sangha untuk mengendalikan Sangha.

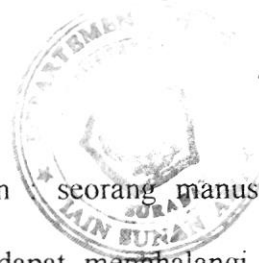
Setelah sampai pada perkembangan ini, maka pentahbisan menjadi salah satu fungsi yang dilakukan oleh Sangha. Pada masa itu Sang Budha sendiri tidak memberikan Ehi Bikkhu Upasampada, dan memerintahkan para Thera untuk tidak lagi memberikan pentahbisan dengan cara Tisanagama Upasampada. Sebagai gantinya beliau memberikan wewenang kepada Sangha untuk melakukan pentahbisan dengan cara Naticatutthakamma Upasampada yang maksudnya para bikkhu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id berkumpul sesuai jumlah bikkhu yang diperlukan dalam sima.<sup>22</sup> Dan metode pentahbisan inilah yang tetap dilakukan sampai sekarang.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditahbiskan menjadi bikkhu dan bikkhuni adalah

#### 1. Kesempurnaan Calon

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 123. Sima adalah suatu lokasi yang telah ditentukan batas-batasnya sebagai tempat melakukan kegiatan-kegiatan Sangha.



Seorang calon harus memenuhi syarat antara lain seorang manusia, berumur lebih dari 20 tahun, tidak cacat tubuh yang dapat menghalangi ia menjalani kebikkhuan, tidak cacat tubuh yang menjadi bahan tertawaan, tidak dikebiri, tidak banci, tidak mengidap penyakit menular, tidak dikenal sebagai kriminal berat, tidak berhutang, bukan pelarian militer atau penjara.

## 2. Kesempurnaan Sangha

Sangha untuk pentahbisan harus terdiri dari paling sedikit lima bikkhu. Salah seorang bertindak sebagai Uphajjaya.

## 3. Kesempurnaan Sima

Pentahbisan harus dilakukan dalam Sima. Bikkhu yang tidak terlibat dalam pentahbisan tidak boleh berada dalam sima dan bikkhu yang berada dalam sima berjarak lebih dari satu hasta dari bikkhu-bikkhu lainnya. Bila ketentuan ini dilanggar maka pentahbisan itu tidak sah dan batal.

## 4. Kesempurnaan Pernyataan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### a. Kesempurnaan Pengusulan

Seorang calon bikkhu harus diusulkan oleh seorang bikkhu yang disebut Upajjhaya. Upajjhaya itu haruslah bikkhu senior yang kompeten dan mampu untuk memenuhi kebutuhan bikkhu dan membimbing seorang bikkhu baru dalam menjalani kabikkhuannya.

b. Kesempurnaan Pengumuman

Setelah Sangha memeriksa calon bikkhu dan ternyata memenuhi persyaratan menurut vinaya, kemudian diumumkan bahwa calon diterima menjadi bikkhu tanpa ada yang keberatan. Bila ini tidak dilakukan pentahbisan tidak sah.<sup>23</sup>

Selain proses pentahbisan, untuk menjadi bikkhu dan bikkhuni harus melalui beberapa tahap sesuai dengan tenggang waktunya. Dari umat biasa dengan mengambil tiga mustika dan Pancasila dapat ditingkatkan menjadi samanera maupun samaneri selama dua tahun dengan mengamalkan Attasila dan Dasasila. Ketika aturan itu sudah terlaksana dengan baik, seseorang sudah menjadi bikkhu dan bikkhuni dengan melaksanakan 227 aturan moral bagi bikkhu dan 311 aturan moral bagi bikkhuni. Ketika telah menjadi bikkhu dan bikkhuni selama 10 tahun mereka disebut Thera dan Theri. Setelah 20 tahun menjadi Thera dan Theri mereka disebut Mahathera dan Mahatheri. Inilah tingkatan kepemimpinan yang tertinggi dalam agama Budha.<sup>24</sup>

Peran perempuan terhadap penyebaran agama Budha tidak dapat diremehkan begitu saja karena dianggap kurang berarti. Malahan bikkhu dan bikkhuni merupakan pemimpin spiritual yang mempunyai andil besar dalam mengembangkan ajaran Budha.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 124-125

<sup>24</sup> Attasilani Mutia, Umat Budhis, Wawancara Pribadi, Malang, 31 Mei 2003

Sang Budha menghormati dan menempatkan kaum wanita pada kedudukan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap beliau yang mengizinkan ibu tirinya Maha Pajapati Gotami untuk menjadi bikkhuni dan diikuti oleh wanita lainnya.

Tetapi mereka harus menerima delapan persyaratan yang keras (Garukamma) dari 311 aturan moral bikkhuni, yaitu :

1. Bagaimanapun seorang bikkhuni senior harus tetap memberi hormat bikkhu yang baru saja ditahbiskan.
2. Seorang bikkhuni tidak boleh menjalani vassa di tempat yang tidak ada bikkhu..
3. Setiap setengah bulan, seorang bikkhuni harus memohon dua hal dari bikkhu Sangha yaitu hari untuk melakukan latihan dan hari untuk mendapatkan nasihat dan teguran.
4. Setelah menjalani vassa, seorang bikkhuni harus memohon kepada bikkhu Sangha dan bikkhuni Sangha untuk mendengarkan teguran dan peringatan apa yang dilihat, didengar, dicurigai mengenai dirinya.
5. Seorang bikkhuni yang melakukan pelanggaran harus menjalani hukuman (manatta) selama setengah bulan lamanya di bikkhu Sangha dan bikkhuni Sangha.
6. Selesai menjalankan masa percobaan selama dua tahun, seorang calon bikkhuni harus memohon ditahbiskan menjadi bikkhuni.
7. Seorang bikkhuni tidak boleh mencaci maki bikkhu.
8. Seorang bikkhuni tidak boleh menegur bikkhu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Teja S. M. Rasyid, Materi Pokok Kitab Vinaya Pitaka I, modul 1-9, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Budha & Universitas Terbuka, 1993, 206

Aturan moral tersebut diatas jangan dipandang diskriminatif, tetapi ini adalah cara Sang Budha yang hati-hati untuk membuat wanita memahami kesulitan yang menghadang di depan mereka, dan untuk menjadi kekuatan institusional bagi bikkhuni itu sendiri. Karena pada masa masa awal, bikkhuni menjelajahi hutan-hutan sendirian untuk mencari ketenangan seperti para bikkhu. Tetapi mereka diserang, Sang Budha kemudian membuat seperangkat aturan yang mengharuskan para bikkhuni untuk tinggal di vihara bersama para bikkhu.

Oleh karena itu selain aturan diatas, para bikkhuni juga tidak boleh tinggal dalam hutan-hutan serta dilarang memakai bedak kecantikan dan ikat pinggang ; yang sepenuhnya dimaksudkan menjaga bikkhu dan bikkhuni tetap berjauhan.<sup>26</sup> Dalam hari-hari Sangha Budha, langkah tersebut merupakan langkah yang besar dalam menuju kehidupan beragama, dimana wanita dapat menjadi sebijaksana pria.

Para bikkhu dan bikkhuni dididik supaya tidak memperturutkan hati, berperilaku yang menimbulkan nafsu (Raga), cinta (Sannoga), penerimaan (Accaya), ketidakreleaan (Assamtutthu), dan yang lain.<sup>27</sup>

Peraturan ini sangat keras dan berat bagi seorang perempuan, tetapi Maha Pajapati Gotami menerimanya dengan senang hati. Kemudian sewaktu Sang Budha pergi ke Vaisali, yang berjarak 200-300 km dari Kapilavastu, Maha Pajapati Gotami

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Khin Mar On, *Permohonan para Bhikkhuni*, Sangha Ratana The Mahatheris, Vol. 1, No. 2

beserta 500 orang wanita itu telah mencukur rambut dan memakai jubah mengikuti perjalanan Sang Budha dengan berjalan kaki ke Vaisali.<sup>28</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Pada mulanya pentahbisan bikkhuni dilakukan oleh Sang Budha sendiri, kemudian dilakukan oleh Sangha. Calon bikkhuni harus ditahbiskan dua kali, pertama oleh Bikkhuni Sangha dengan Upajjhaya seorang Theri yang terlatih dalam Dharma dan Vinaya dan kedua dilakukan oleh Bikkhu Sangha. Setelah dua upacara upasampada ini selesai barulah wanita tersebut sah menjadi bikkhuni.<sup>29</sup>

Setelah ditahbiskan menjadi seorang bikkhu dan bikkhuni harus menjalankan sila dan vinaya untuk mencapai tingkat kesucian. Vinaya ini disebut Sutta Vibhanga terdiri dari Maha Vibhanga untuk bikkhu dan Cula Vibhanga untuk bikkhuni.

Maha Vibhanga disebut juga bikkhu Vibhanga terdiri dari 227 peraturan latihan yang menjadi sumber bagi Patimokha Sila. Peraturan ini tidak diberikan sekaligus, tetapi setelah terjadi kasus demi kasus yang menyangkut perilaku para bikkhu yang dicela oleh para bijaksana. Bikkhu Vibhanga terdiri dari :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Parajika: bagian ini terdiri dari empat disiplin apabila dilanggar menyebabkan gugur kebikkhuannya.
2. Sanghadisesa: bagian ini terdiri dari 13 disiplin. Bila dilanggar hanya dapat diselesaikan oleh sekurang-kurangnya 20 Sangha.
3. Aniyata: bagian ini terdiri dari dua disiplin yang berkenaan dengan pelanggaran yang tidak jelas.

---

<sup>28</sup> Teja S. M. Rasyid, Materi Pokok, 206

<sup>29</sup> *Ibid.*, 82

4. Nissaggiya Pacittiya: bagian ini terdiri dari 30 disiplin apabila dilanggar menyebabkan kejatuhan dalam mental spiritual.
5. Pacittiya: bagian ini terdiri dari 92 disiplin apabila dilanggar menyebabkan kemerosotan sila.
6. Patidesaniya: Bagian ini terdiri dari empat disiplin apabila dilanggar memerlukan pengakuan bersalah.
7. Sekhiyadamma: bagian ini terdiri dari 72 disiplin tatakrama.
8. Adhikaranasamatha: bagian ini terdiri dari tujuh peraturan yang berkenaan dengan proses hukum untuk penyelesaian permasalahan dalam Sangha.<sup>30</sup>

Sedangkan Cula Vibhanga disebut juga bikkhuni Vibhanga yang terdiri dari 311 peraturan latihan yang juga merupakan sumber Patimokha Sila untuk bikkhuni dengan susunan yang sama dengan Patimokha Sila bikkhu. Terdiri dari :

1. 8 Parajika.
2. 17 Sanghadisesa.
3. 30 Nissaggiya.
4. 166 Pacittiya.
5. 8 Patidesaniya.
6. 75 Sekhiyadhamma.
7. 7 Adhikaranasamatha.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 6-7

<sup>31</sup> *Ibid.*, 7



Itulah tadi peraturan latihan yang harus dilaksanakan oleh seorang bikkhu dan bikkhuni dalam mencapai tingkat Arahata. Sila dan vinaya tersebut setelah dipahami dengan baik dan benar, maka dapat melakukan meditasi.

Meditasi merupakan suatu usaha dalam mencapai ketenangan batin dan dalam mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi. Seorang bikkhu maupun bikkhuni harus melakukan meditasi untuk mendapatkan pencerahan seperti Sang Budha. Tidak hanya bikkhu dan bikkhuni, umat biasa pun juga dapat melakukan meditasi untuk mendapatkan ketenangan batin dalam kehidupan sehari-hari.

Meditasi dibagi dua yaitu: *Pertama*, Samatha Bhavana adalah pengembangan ketenangan batin atau konsentrasi. Samatha adalah keadaan batin yang tak tergoncangkan, tenang, aman, damai dan nyata yang diakibatkan oleh pemusatan pikiran yang kuat pada satu objek tertentu. Pemusatan pikiran adalah suatu keadaan dimana semua bentuk-bentuk batin terkumpul dan terpusat serta terkendali oleh kekuatan kemauan yang ditujukan pada suatu obyek. Jadi pikiran tidak dibiarkan mengembara kesana-kemari tak tentu arah dan tujuannya yang dapat membuat kita lelah tanpa hasil. Proses ini dari pemusatan pikiran itu adalah mengatur keadaan pikiran itu setingkat demi setingkat sampai tercapainya kekuatan yang dapat memegang pikiran itu pada satu obyek.<sup>32</sup>

Dalam tingkat konsentrasi yang biasa Samatha Bhavana sudah cukup dapat memberikan manfaat seperti mencegah stress, mendapatkan keselarasan dan keseimbangan batin untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan sehari-hari dengan

---

<sup>32</sup> Lindawati T. , *Mutiara Dhamma II*, (Bali : Mutiara Dhamma), 2

baik. Dalam Samatha Bhavana terdapat 40 obyek yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan kemampuan pribadi seseorang.<sup>33</sup>

*Kedua*, Vipassana Bhavana adalah pengembangan batin menuju ke kebijaksanaan atau pandangan terang. Seseorang yang melatih Vipassana Bhavana akan dapat mengetahui dan melihat dengan jelas bahwa Nama dan Rupa (batin dan jasmani) adalah Anicca (tidak kekal), Dukkha (tidak memuaskan) dan Anatta (tanpa aku/inti yang kekal). Dengan dimengertinya Tiga Corak Umum tersebut, maka seseorang dapat terbebas dari keterikatan atau kemelakatan, dan dapat merealisasikan nibbana atau kebebasan tertinggi. Inilah sebenarnya tujuan akhir umat Budha. Untuk melaksanakan Vipassana Bhavana, obyek yang dapat dipergunakan adalah Empat Satipathana (4 perkembangan perhatian yang mulia), yaitu :

1. Perenungan terhadap badan jasmani.
2. Perenungan terhadap perasaan.
3. Perenungan terhadap batin.
4. Perenungan terhadap Dhamma.<sup>34</sup>

Selain melakukan meditasi, seorang bikkhu dan bikkhuni juga melayani umatnya dengan memberikan ceramah dan pelajaran tentang Dhamma. Pelayanan ini dilakukan secara rutin dalam vihara maupun menghadiri undangan pada acara-acara

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 6

<sup>34</sup> *Ibid.*, 6



perayaan, seperti acara ulang tahun, pembukaan toko, upacara kematian, kelahiran bayi dan sebagainya, mereka membacakan paritta atau doa.<sup>35</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Aktifitas bikkhu dan bikkhuni selain bermeditasi dan melayani umat adalah chanting artinya mengucapkan dan mengulang-ulang khotbah-khotbah Sang Budha secara bersama-sama selama satu jam, dalam chanting juga ada meditasi yaitu meditasi metta (kasih sayang). Dan mereka juga mempelajari Dhamma dengan membaca buku, mendengarkan khotbah dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup>

## B. SEJARAH PERJALANAN BIKKHUNI

Dimulai lima tahun setelah Budha mencapai pencerahan sempurna, saat itu Budha Gautama mentahbiskan Maha Pajapati Gotami atas permintaan Ananda. Maha Pajapati Gotami menerima pentahbisan lebih tinggi dengan menerima persyaratan Gharudhamma. Demikian pula 500 wanita lainnya yang suaminya telah menjadi bikkhu.<sup>37</sup>

Dan Budha sendiri yang mentahbiskan mereka dengan kalimat : “*Anujanami bhikkave, bikkhunia upasampadentum*” (*cullavaga*). Yang berarti : “*Saya izinkan, para bikkhu dan para bikkhuni untuk diupasampadakan atau ditahbiskan oleh para bikkhu.*” Saat itulah kelompok pertama Sangha bikkhuni berdiri dengan peraturan dan ketetapan dari Sang Budha. Hal ini yang mendasari argumen bahwa Sangha bikkhuni

<sup>35</sup> Attasilani Mutia, Wawancara Pribadi, Malang, 3 Juni 2003

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> Bhikkhu Mettanando, “Perjuangan Kaum Perempuan Memulihkan Hak Hidup Sucinya”, *Hikmah Budhi*, No. 305, Edisi: 31, Januari, 2002, 9

tetap dapat dipulihkan tanpa melalui pantahbisan oleh Sang Budha, namun cukup oleh Sangha bikkhu.<sup>38</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Di zaman India Kuno, saat Raja Asoka memerintah kerajaannya di Pataliputra

India pada tahun 304-232 SM, komunitas bikkhuni dan bikkhu mengalami kejayaan. Raja Asoka memiliki seorang putra bernama Ven. Bhikku Mahinda Thera yang dikirim ke Sri Lanka dengan misi menyebarkan agama Budha. Tidak lama kemudian Raja Sri Lanka Devanampiya Tissa memeluk agama Budha. Ven. Bikkhu Mahinda mendirikan Mahavira sebagai tempat ibadah para Sangha bikkhu. Dan memiliki seorang putri yang bernama Sanghamitta juga menjadi bikkhuni. Dengan membawa potongan pohon Bodhi, beliau mendirikan Sangha bikkhuni di Sri Lanka.<sup>39</sup>

Budhisme berkembang di Sri Lanka seiring dengan bertambahnya jumlah bikkhu dan bikkhuni. Mereka menyebarkan Dhamma sampai ke pelosok pedesaan. Bikkhuni Sangha di Srilanka berkembang sampai pemerintahan Raja Mahinda IV. Penyerbuan bangsa Tamil dari India Selatan ke Sri Lanka pada tahun 1017 berakibat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id lenyapnya bikkhuni Sangha. Bikkhu dan bikkhuni banyak yang diperkosa dan dibunuh.<sup>40</sup>

Pada abad ke-13 garis keberlanjutan atau silsilah Sangha bikkhuni di Sri Lanka pun terputus. Untuk beberapa kali Sangha bikkhuni dicoba untuk dibangkitkan kembali, namun akhirnya tetap tidak bisa. Pada tahun 1753 bikkhu Sangha berhasil dibangkitkan kembali di Sri Lanka oleh rombongan yang secara khusus dikirim dari

<sup>38</sup> Anagarini Santini, Wawancara Pribadi, Bandung, 28 April 2003

<sup>39</sup> Dari artikel [www.geocities.com](http://www.geocities.com) dengan judul: *Sejarah Agama Budha Theravada*

<sup>40</sup> Samanera, Wawancara Pribadi, 3 Juni 2003

Thailand, Birma, dan Ramanna untuk menerima pentahbisan menjadi bikkhu atau bikkhuni bila terdapat Sangha yang mentahbiskannya. Namun, sangha bikkhuni tetap tidak terpulihkan.<sup>41</sup>

Di tahun 429 M, bikkhuni Devasana dengan beberapa bikkhuni lainnya melakukan perjalanan dari Sri Lanka ke Cina untuk membentuk komunitas Sangha bikkhuni di sana. Tetapi sebelum datang ke Cina, kurang lebih 100 tahun yang lalu, para bikkhu telah memberikan pentahbisan untuk perempuan, dengan tradisi Darmagupta Vinaya yang mana masih merupakan cabang dari Theravada. Semua vinaya yang terdapat dalam Patimokha Bikkhuni Darmagupta sama dengan Patimokha Bikkhuni Theravada. Sehingga saat bikkhuni menginjakkan kaki di Cina, mereka hanya mantahbiskan kembali para perempuan itu dan menciptakan sistem pentahbisan yang saat ini masih dipakai.<sup>42</sup>

Pada abad 19, seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat. Secara tidak langsung mendorong perempuan berkiprah pada sektor publik, dan banyaknya wanita terdidik mendorong mereka mempertanyakan posisinya, terutama sisi spiritual dalam Budhisme. Hal inilah yang mendorong mereka dan para rohaniawan agama Budha khususnya dari Sri Lanka untuk membangkitkan dan mendirikan kembali Sangha Bikkhuni tradisi Theravada. Padahal sesuai dengan Vinaya Pitaka dalam tradisi

---

<sup>41</sup> Bhikkhu Mettanando, *Perjuangan*, 48

<sup>42</sup> *Ibid.*, 48

Theravada, hal ini sudah tidak mungkin dilakukan lagi, karena telah lama sirna di dunia ini.

Namun, hal ini banyak menimbulkan kontroversi ada yang pro dan ada yang kontra dengan argumen masing-masing, tetapi lebih banyak yang kontra. Mereka yang menyetujui berdirinya kembali Sangha Bikkhuni tradisi Theravada berargumen bahwa kebangkitan kembali Bikkhuni Sangha sebagai jawaban atas kebutuhan spiritual perempuan dalam Budhisme dan juga Bikkhuni Sangha Mahayana yang ada di Cina, Taiwan dan sebagainya, saat ini adalah kelanjutan bikkhuni dari Sri Lanka yang datang dan kemudian tinggal di Cina dan Taiwan.<sup>43</sup>

Pemerintah Sri Lanka yang jelas-jelas merupakan salah satu penjaga tradisi Theravada, tidak mengakui keberadaannya sebagai organisasi keagamaan yang absah. Di pihak Sangha, Amapura Nikaya, Ramanna Nikaya, Siam Nikaya Asgiriya Chapter, Siam Nikaya Malvatha Chapter dan Siam Nikaya Kotte Chapter dengan tegas menolak keberadaan Sangha baru tersebut. Bahkan Pemimpin Spiritual dan Keagamaan terkemuka Tibet, Y. M. Dalai Lama yang mengikuti secara ketat Vinaya tradisi Dharmagupta, juga menolak organisasi baru tradisi Theravada tersebut.<sup>44</sup>

Mereka beralasan bahwa Vinaya tradisi Dharmagupta sudah lama hilang dan sesuai dengan Vinaya tradisi Theravada untuk memberikan upasampada seorang bikkhuni diperlukan dua sangha; bikkhuni sangha dan bikkhu sangha. Yang pertama

---

<sup>43</sup> Bhikkhu Indaratano, "Terbentuknya Post-Theravada Sangha Bhikkhuni dalam Dasa Warsa Terakhir; Antara Dilema dan Asumsi Pelecehan Konstitusional Religius Historis", *Ehipassiko*, Edisi 5, 3 Oktober 2002, 19

<sup>44</sup> *Ibid.*, 20

mendapat upasampada dari sangha bikkhuni dan yang kedua dari bikkhu sangha yang disebut dengan Upasampada dengan dua-empat deklarasi.<sup>45</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
Oleh karena itu Sangha Bikkhuni dengan tradisi Theravada sudah tidak dapat

dibangkitkan kembali, karena hal itu tidak ada dalam Vinaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 20.

## BAB IV

### BIKKHUNI DAN KEADILAN GENDER

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. BIKKHUNI SEBAGAI PEMIMPIN SPIRITUAL

Lahirnya kapitalisme dunia pada abad 19 yang ditandai dengan era industrialisasi, telah mendorong kaum wanita untuk bangkit di dalam memperjuangkan hak-haknya. Ketika gaya hidup konsumerisme mulai melanda masyarakat dunia, dimana kebutuhan hidup sebuah keluarga tidak cukup hanya ditopang oleh kaum laki-laki, hal ini telah mendorong kaum wanita untuk keluar dari belenggu sektor domestik. Akan tetapi, hal ini telah berdampak pada isu gender sebagai identitas kultural sekaligus identitas religi dengan ungkapan bahwa wanita telah mengingkari kodratnya. Seolah-olah norma masyarakat juga agama telah menjadi penghalang besar bagi gerakan feminisme.<sup>1</sup>

Kita tidak meragukan bahwa agama telah menjadi dorongan moral untuk menghindari bentuk-bentuk intoleransi seperti rasialis, kekerasan chauvinisme dan sebagainya. Akan tetapi, kita sering kali melihat tidak ada jaminan yang pasti mengenai kesejajaran perempuan dan laki-laki, dalam praktek spiritual agama maupun dalam budaya yang mengadopsi ajaran agama. Inilah yang menjadi

---

<sup>1</sup> Upa. Silakumaro Siky Hendro Wibowo, "Perempuan dan Perannya sebagai Institusi Pendidikan", dari majalah *Ehipassiko*, Edisi 5. Oktober 2002, 17



kewajaran apabila gerakan feminisme sebagai gerakan pemberdayaan perempuan sering berbenturan dengan agama.<sup>2</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Dengan lahirnya gerakan feminisme dan santernya isu tentang gender, maka menjadi sebuah keniscayaan untuk memperbincangkannya. Dan tidak jarang dari segi aplikasinya sering menimbulkan permasalahan. Dalam kitab suci agama-agama wanita juga dikisahkan, tetapi dalam prosentase yang berbeda dengan laki-laki. Sebenarnya esensi dari setiap ajaran agama adalah untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan. Tetapi secara tidak langsung agama juga melanggengkan patriarki. Apakah ini murni dari teks kitab suci atau rekayasa manusia?

Agama Budha sebagai reformasi dari agama sebelumnya yaitu agama Hindu menghapus perbedaan kasta dan jenis kelamin dengan mengangkat kedudukan kaum wanita tanpa melihat status sosialnya.<sup>3</sup> Karena kehidupan perempuan pada saat itu sangat tertindas dan tereksplotasi oleh struktur sosial serta kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan batin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Kehidupan spiritual bikkhuni pertama kali dilakukan oleh Maha Pajapati Gotami dan diikuti wanita lainnya dengan mendirikan Sangha. Mereka harus memenuhi Garukhamma sebagai prasyarat menjadi bikkhuni dan Meskipun Garukhamma tersebut terlihat diskriminatif dari perspektif gender, tetapi menurut Sang Budha aturan moral itu untuk melindungi dan memberikan keselamatan bagi

<sup>2</sup> Upa. Vijjayanto T. Widiyanto, "Feminisme : Menghindari Jebakan Struktural untuk Perjuangan Nilai" dari majalah *EHIPASSIKO*, Edisi 5, Oktober 2002, 6

<sup>3</sup> Catsumarn Kabilsingh dalam *Wacana Teologi Feminis ; perspektif agama-agama, geografis dan teori-teori*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1, 18

wanita yang secara biologis lemah dan terdiskriminasi dari lingkungan sosialnya serta untuk menjadi kekuatan institusional bagi bikkuni itu sendiri.<sup>4</sup>

Dalam menjalani kehidupan sebagai pemimpin umat seorang bikkhu dan bikkuni harus melaksanakan sila dan vinaya yaitu aturan-aturan kebikkhuan dan kebikkhunan, serta menjalani meditasi dengan sungguh-sungguh dalam rangka mencapai kesucian Arahat. Selain itu mereka juga memberikan pelajaran Dhamma kepada umat sebagai hubungan timbal balik.

Sejak didirikannya Sangha bikkuni, wanita dapat mengaktualisasikan diri sama halnya dengan laki-laki dalam memenuhi sisi batinnya. Banyak wanita yang telah berhasil mencapai tingkat kesucian Arahat. Seperti Arahat Khema dan Arahat Uppalavana yang selalu dipuji oleh Sang Budha.<sup>5</sup>

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Sir Charles (1982) yang menuliskan bahwa tampaknya kaum wanita di negara-negara Budhis mempunyai status yang sama dengan laki-laki. Campbel (1902) juga menuliskan bahwa posisi kaum wanita di negara Siam secara keseluruhan lebih baik dan terlihat sangat menyolok perbedaanya dengan posisi kaum wanita di negara-negara lain. Hal ini disebabkan pengaruh agama Budha yang telah menempatkan status kaum wanita pada proporsi yang benar.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Samanera, Wawancara Pribadi, Malang, 31 Mei 2003

<sup>5</sup> Bikkhu Payutto, "Tempat Wanita Berada", dalam majalah *Ehipassiko*, Edisi 5, Oktober, 2002

<sup>6</sup> *Ibid.*, 6

Di samping itu persaudaraan bikkhuni berhasil disebarluaskan di negara-negara tetangga, seperti Cina, Taiwan dan Sri Lanka yang pertama kali dibawa oleh putri Raja Asoka yaitu Bikkhuni Sanghamitta yang juga sebagai kepala Sangha Bikkhuni.

Tetapi pada tahun 1017 Sangha bikkhuni di Sri Lanka ini diserbu tentara dari suku Tamil India, karena peperangan ini semua bikkhu dan bikkhuni mati. Akhirnya garis kebikkhunan ini hilang sampai sekarang, meskipun beberapa kali berusaha dibangkitkan, tetapi hanya Sangha bikkhu saja yang berdiri.<sup>7</sup>

Hal ini adalah tragis dan menyedihkan karena kesempatan wanita dalam religius telah hilang. Tetapi akhir-akhir ini Sangha bikkhuni mencoba dibangkitkan kembali sebagai reaksi kebutuhan wanita masa kini, meskipun keberadaannya sangat kontroversial.

Bahkan pemimpin spiritual dan keagamaan terkemuka Tibet Y.M. Dalai Lama yang memegang teguh tradisi Dharmagupta aliran Theravada dengan tegas menolak pendirian Sangha Theravada bikkhuni ini. Tetapi mereka memberikan solusi alternatif, bahwa meskipun tidak menjadi samaneri maupun bikkhuni wanita dapat mencapai nibbana dengan melaksanakan sila dan vinaya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ada yang menamakan diri biarawati, silacarini, anagarini, attasilani, mae chii dan sebagainya, tetapi nama-nama tersebut tidak menghilangkan substansi dari ajaran Sang Budha. Embel-embel samaneri ataupun bikkhuni akan mubadzir jika tingkah laku mereka secara konstitusi, pragmatik dan religius tidak sesuai. Yang penting

<sup>7</sup> S. M. Teja Rasyid, *Kitab Suci Vinaya Pittaka 1 modul 1-9*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Budha dan UT, 1993, 82

adalah praktik bukan embel-embel nama maupun sekedar teori. Justru sebenarnya betapa berdosanya menyalahgunakan, melecehkan dan mengkhianati tata tertib dan tata cara yang diakui keabsahannya secara historis maupun konvensional.<sup>8</sup>

Demikianlah Budha memandang posisi bikkhuni dalam kehidupan spiritual agama. Sang Budha juga mengajarkan bahwa perempuan juga dapat mencapai nibbana dan menjadi bikkhuni tetapi dengan cara dan aturan-aturan yang berbeda dari bikkhu.

## **B. BIKKHU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

Pada awalnya ajaran Budha memperlihatkan corak yang egalitarian. Budha memberikan pengajaran yang sama kepada para muridnya baik laki-laki maupun perempuan. Jalan spiritual terbuka untuk semua pengikutnya bahkan tujuannya pun juga sama. “Siapapun yang memiliki sebuah kendaraan seperti itu baik perempuan atau laki-laki, sungguh dengan mempergunakan kendaraan tadi, ia akan mencapai nirvana”<sup>9</sup>

Segera setelah Budha mencapai pencerahan, ia membentuk sebuah ordo untuk para bikkhu yang telah meninggalkan kehidupan dunia, dan beberapa tahun setelah itu ia diminta ibu asuhnya yang juga bibinya yaitu Maha Pajapati Gotami untuk membentuk sebuah ordo yang sama bagi perempuan. Namun permohonan ibu

<sup>8</sup> Y. M. Bikkhu Indaratano, “Terbentuknya Post Theravada Sangha Bhikkhuni Dalam Dasa Warsa Terakhir”, dalam majalah *EHIPASSIKO*, Edisi 5, Oktober 2002.

<sup>9</sup> Nancy Schuster Barnes, dalam *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, (State University of New York, 2002), cet. 1, 127.

asuhnya itu ditolak sampai tiga kali, dan hanya setelah Ananda sahabat dan pengikut setianya ikut campur, permohonan itu dikabulkan.<sup>10</sup> Pada saat itu pula Sangha bikkhuni memiliki bikkhuni YM Khema dan YM Uppalavana yang kehebatannya sejajar dengan para bikkhu seperti YM. Phra Mogalanna dan YM Sariputta yang menjadi murid utama Sang Budha.<sup>11</sup>

Namun kalau dicermati lebih dalam lagi ternyata Sang Budha mentahbiskan wanita menjadi bikkhuni dengan keengganan yang besar, disamping itu juga Sangha bikkhuni tidaklah dibentuk dengan mudah. Sang Budha menetapkan aturan-aturan khusus bagi perempuan yang ingin menjadi bikkhuni. Mereka harus menjalani delapan aturan keras yang mengharuskan setiap bikkhuni untuk memperlakukan setiap bikkhu sebagai senior dan atasannya bahkan aturan itu juga memberikan arahan agar semua upacara keagamaan formal yang diperuntukkan bagi perempuan dilakukan dibawah bimbingan atau disertai kehadiran bikkhu, termasuk pelaksanaan hukuman bagi bikkhuni yang berbuat kesalahan.<sup>12</sup>

Dengan ditetapkannya aturan-aturan bagi bikkhuni tersebut, bikkhuni tetap menempati posisi yang jelas-jelas lebih rendah dalam semua hubungan yang mereka jalin dengan para bikkhu, kontrol dan kepemimpinan dalam seluruh Sangha tetap berada pada tangan para bikkhu. Para bikkhu lebih banyak terlihat mendominasi Sangha dan lebih banyak tampil di depan umum daripada bikkhuni.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 129

<sup>11</sup> Phra Dhammapitaka, "Tempat Wanita Berada", dalam majalah *Ehipassiko*, Edisi 5, Oktober 2002

<sup>12</sup> Samanera, Wawancara Pribadi, Malang 31 Mei 2003

Menurut Kitab Vinaya, aliran Theravada mengakui bahwa perempuan benar-benar dapat mencapai arahat yaitu orang-orang yang mencapai nirvana. Namun ia juga menyatakan bahwa Sangha akan menjadi lemah karena kehadiran perempuan didalamnya dan karena alasan inilah mereka harus diatur dengan aturan-aturan khusus. Kehadiran mereka juga dianggap sebagai penghalang bagi keberlangsungan pengajaran Budhis yang sejati (dharma), yang semestinya bisa bertahan sampai 1000 tahun dengan kehadiran mereka hanya menjadi 500 tahun.<sup>13</sup> Dan dalam Theravada juga beranggapan bahwa bikkhuni tidak dapat dibangkitkan kembali setelah adanya perang di Sri Lanka sebab para bikkhuni yang ada pada saat itu banyak yang diperkosa dan dibunuh.<sup>14</sup>

Pernyataan ini kemudian ditentang oleh mayoritas pengikut Buddhisme aliran Mahayana dan Vajrayana, mereka menolak argumen tersebut sebab menurut mereka bertentangan dengan ajaran Budha yang otentik. Aliran-aliran Mahayana dan Vajrayana yang muncul kemudian justru banyak memberikan kesempatan kepada perempuan, mereka boleh menjadi guru-guru agama dan pembimbing spiritual. Dan jika mereka melakukan hal tersebut jelas mereka tidak berada dalam kehidupan kedua setelah laki-laki.<sup>15</sup>

Tetapi walaupun demikian, para bikkhuni yang diakui dalam Mahayana dan Vjrayana tetap mengikuti aturan-aturan khusus tersebut dan memang secara alami

<sup>13</sup> *Ibid.*, 129

<sup>14</sup> S.M. Rasyid Teja, Materi Pokok Kitab Vinaya Pitaka I, Dirjen BIMAS Hindu, Budha dan Universitas Terbuka, 83

<sup>15</sup> Nancy Schuster Barnes, *Perempuan*, 158

atau biologis laki-laki dan perempuan berbeda sehingga perbedaan peran dalam masyarakat dianggap sebagai gejala alamiah (nature) atau justru perbedaan peran tersebut merupakan bentukan budaya dan lingkungan yang ada dan berlangsung pada waktu itu (nurture).<sup>16</sup> Sebab tidak menutup kemungkinan budaya Hindu pada saat awal Budha masih kuat sehingga Sang Budha masih perlu membuat aturan khusus bagi perempuan yang ingin jadi bikkhuni.

Kalau memang para bikkhuni itu masih harus melakukan perbedaan aturan tersebut, jelas keluar dari konsep gender sebab menurut konsep keadilan gender posisi perempuan sejajar dengan laki-laki dengan mengakui bahwa antara laki-laki dan perempuan memang ada perbedaan secara biologis yang tidak dapat dipaksa untuk sama secara total bahkan merubahnya, maka keberadaan laki-laki dan perempuan adalah untuk saling melengkapi dan mewujudkan keseimbangan dan keselarasan.

Sebagaimana dalam teori Yin dan Yang dalam Kosmologi Cina bahwa simbol Yin dan Yang sangat menekankan konsep harmoni dan keseimbangan, dan ini disimbolkan dari keduanya yang saling merangkul dalam keselarasan dan keterpaduan. Jika harmoni antara keduanya hilang, maka alam semesta akan berhenti mengalir dan segala sesuatu akan kacau. Dikatakan kesatuan wajah Yin dan Yang tidak lain adalah Tao, yaitu kualitas paling primordial. Kesatuan Tao ini memanifestasikan dirinya pada setiap ciptaan secara unik, sehingga terjadi

---

<sup>16</sup> Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda*, (Bandung : Mizan, 1999), cet. 1, h. 98



differentiasi dengan kualitasnya masing-masing. Namun semua kualitas selalu terkait dengan yang dua Yin dan Yang dan yang satu Tao.<sup>17</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Dalam konsep keadilan gender dikenal adanya kesatuan dalam keragaman

(equality in diversity) kesetaraan ini bukan dengan memberikan perlakuan sama kepada setiap individu-individu yang mempunyai aspirasi dan kebutuhan berbeda, melainkan dengan memberikan perhatian yang sama kepada setiap individu yang berbeda agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi.

Maka ketika konsep ini dipergunakan dalam fenomena bikkhuni jelas mereka tidak mendapatkan perhatian yang sama, sebab aturan yang harus dijalankan dalam menempuh kibikkhuniannya terlampaui lebih berat daripada bikkhu, memang benar antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mencapai nirvana, tapi aturan-aturan tersebut telah menempatkan posisi perempaun dibawah laki-laki, jelaslah bahwa kebikkhuan dalam agama Budha menyimpang dari konsep keadilan gender. Mereka tetap ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah dalam Sangha dan hanya memiliki sedikit harapan untuk dapat menduduki posisi kepemimpinan di dalamnya.

<sup>17</sup> Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, (Bandung : Mizan, 1998), 28



## BAB V

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis baik kajian pustaka maupun studi lapangan dengan wawancara didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kebikkhuan perempuan dibentuk sebagai jawaban kebutuhan kaum perempuan yang ingin menjalani kehidupan mereka dalam pencarian kebenaran spiritual tanpa melihat status sosialnya. Dan secara spiritual, Sang Budha memang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama dapat menjadi arahat dan mencapai nibbana, untuk alasan inilah kemudian beliau mentahbiskan laki-laki dan perempuan menjadi bikkhu dan bikkhuni. Namun fenomena yang terjadi setelah Sang Budha Parinibbana, muncullah delapan peraturan khusus yang merendahkan dan membatasi kekuasaan bikkhuni dalam Sangha.
2. Konsep Keadilan Gender dalam Kepemimpinan Spiritual agama Budha dalam hal ini bikkhu dan bikkhuni cenderung mengabaikan perbedaan kodrat atau biologis antara laki-laki dan perempuan dan sosialisasi budaya dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda dalam masyarakat tanpa melihat sisi positif dari perempuan dan azas saling melengkapi satu sama lain. Sehingga keadilan dalam kepemimpinan spiritual terhadap laki-laki dan perempuan belum dapat terwujud.

## B. KRITIK DAN SARAN

Dalam hal ini kajian tentang konsep gender dalam agama-agama khususnya Kepemimpinan Spiritual (bikkhu dan bikkhuni) dalam agama Budha masih memerlukan penelitian yang mendalam dan sungguh-sungguh dan perlu improvisasi dalam segala aspeknya. Karena dari penelitian di atas, meskipun Budha telah memberikan tempat yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam spiritualnya, namun dari sisi biologis dan sisi sosial keberadaan laki-laki dan perempuan masih diperdebatkan.

Teks kitab suci yang tidak sesuai lagi dengan zamannya seharusnya dilakukan reinterpretasi dan restrukturisasi untuk membumikan ajaran suci yang dibawa oleh Sang Budha Gautama. Karena jika demikian agama Budha akan kehilangan essensi ajarannya dan kehilangan generasi untuk selamanya.

Tidak lupa bagi pembaca, skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Tetapi inilah karya terakhir saya semoga bermanfaat dan membuka cakrawala berfikir pembaca. Akhirnya kritik dan saran yang membangun diperlukan guna penyempurnaan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Baidawi, Zakiyudin (ed.). 1997. *Wacana Teologi Feminis Budhis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Bainar (ed.). 1998. *Wacana Perempuan Dalam Keindonesiaan Dan Kemodernan*, Jakarta, PT. Pustaka Cidesindo.

Barnhouse, Ruth Tiffany. 1988. *Identitas Wanita*, Yogyakarta, Kanisius.

Dari makalah Seminar Sehari tentang "Mengatasi kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Perolehan Pendidikan Formal", disampaikan oleh Simung D. Kristanto.

Dari wawancara pribadi tentang *Bikkhu Dalam Budha Theravada* dengan Attasilani Mutia dan samnera, Malang, 31 Mei 2003.

Dari wawancara pribadi tentang *Bikkhuni dalam Budha* dengan Bikkhuni Sassana Kossala Santini, Senin, 28 April 2003.

Dari wawancara pribadi tentang *Bikkhuni dalam Budha Mahayana* dengan Ven. Sakya Dharmabijna, Surabaya, 14 Mei 2003.

Departemen Agama Republik Indonesia, 1991, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta, Dana Bhati Wakaf.

Dhammavisarada, Pandita. 1997. *Sila dan Vinaya*, Jakarta, Penerbit Budhis Bodhi.

Dikutip dari e-mail Hendri Tan dalam Milis Budha. 1999. *Reformasi Kelembagaan Agama Budha Indonesia*. Jakarta, 4 Agustus.

Djam'annuri (ed.). 2000. *Agama Kita*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ecol, John & Hasan Sadyli. 1983. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia.

Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Hakim, Agus, 1990, *Perbandingan Agama*, Bandung, CV. Diponegoro.

Hadiwiyono, Harun. 2000. *Agama Hindu dan Budha*, Jakarta, BPK Gunung Mulia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Hayati, Elli Nur. 2000. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ihromi, T. O. 1995. *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Illich, Ivan. 1998. *Matinya Gender*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Khin Mar On. 1981. *The Order of Buddhist Nuns*, Bhikkuni Sasana, vol 1, no. 2.
- Lindawati, T., *Mutiara Dhamma II*, Bali.
- La Rose, 2001. *Pornografi, Eksploitasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Media Massa*, Jurnal Perspektif, Edisi III.
- Macdonald, Mandy, Sprenger, Ellen, Dubel, Iren, 1999, *Gender dan Perubahan Organisasi*, Pustaka Pelajar.
- M. Masyur Amin, (ed.). 1992. *Wanita Dalam Percakapan Antar Agama*, Yogyakarta, LKPSDM NU DIY.
- Mahathera, Alm. Ven. Narada. 1998. *Sang Budha dan Ajaran-Ajarannya*, Jakarta, Yayasan Dhammadipa Arama.
- Majalah EHIPASSIKO, Edisi 5, Oktober 2002.
- Majalah HIKMAHBUDHI, *Perjuangan Kaum Perempuan Memulihkan Hak Hidup Sucinya*, Edisi 305, Januari, 2002.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda*, Bandung, Mizan.
- Mosse, Julia Claves. 1996. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Murata, Sachiko, 1998. *The Tao of Islam*, Bandung, Mizan.
- Ollenburger, C. Jane & A. Moore, Helen. 1996. *Sosiologi Wanita*, Jakarta, Rinneka Cipta,
- Piyananda, Ven. Walpola. 1990. *Peran Sangha dan Umat*, Majalah Voice Of Buddhism, Desember, Vol. 28, No. 2, Malaysia.
- S. M. Rasyid, Teja, 1993. *Materi Pokok Kitab Suci Vinaya Pittaka I modul 1-9*, Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha dan Universitas Terbuka.
- Saptari, Ratna, & Holzner, Brigitte. 1997. *Perempuan Kerja Dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti,.

*Sejarah Agama Budha Theravada*, [www.geocities.com](http://www.geocities.com)

Sharma, Arvind (ed.). 2002. *Perempuan dalam Agama-Agama Dunia*, State University of New York Press.

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

Tim Penyusun. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Umar, Nasaruddin, Dr. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina.

Widyadarma, MP. Sumedha. 1994. *Dhamma-Sari*, Jakarta.

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)

[digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id) [digilib.uinsa.ac.id](http://digilib.uinsa.ac.id)